



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

2021



DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kata PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karuniaNya atas tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2021.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat disebutkan bahwa salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkat kan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi ataupun yang akuntabel.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DIPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja ini akan diuraikan mengenai history suatu instansi dari awal sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan pada akhir tahun anggaran.

Demikian laporan kinerja ini disusun. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan gambaran tentang akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan

Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun anggaran 2021 dan menjadi umpan balik guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



ARVY ARGYANTORO, MA

Ringkasan EKSEKUTIF

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat. Berdasarkan Renstra periode 2020-2024, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air. Dan juga memiliki Fungsi Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air :

- a) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) Penyusunan dan evaluasi standar pelayanan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c) Pelaksanaan analisis dan asesmen pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d) Penyusunan rekomendasi Kerjasama prakarsa badan usaha;
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan infrastruktur sumberdaya air;
- f) Pengusahaan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah bagi pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g) Penyiapan pelaksanaan program penggabungan infrastruktur;
- h) Pengelolaan tenaga ahli dan pejabat fungsional pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- i) Pengembangan perjanjian kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- j) Penyusunan rekomendasi penetapan pemenang dan penunjukan badan usaha pelaksana;
- k) Pemantauan dan evaluasi target pemenuhan standar layanan pada pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- l) Pemantauan pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air;

- m) Pelaksanaan penyelesaian permasalahan dan sengketa pelaksanaan kerjasama pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- n) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

SAKIP merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja/unit kerja, unit organisasi sampai tingkat kementerian/lembaga. Kinerja disini merupakan hasil/output dari suatu kegiatan/program yang telah maupun hendak di capai, dari mulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, laporan kinerja sampai dengan review dan evaluasi kinerja sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dengan jelas, Demikian hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden no 29 tahun 2014.

Pada tahun anggaran 2021, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki anggaran sebesar Rp 22.000.000.000,00,- (dua puluh dua milyar rupiah) sesuai DIPA NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021 tanggal 23 November 2020. Selama tahun anggaran 2021, Direktorat PPISDA mengalami revisi DIPA sebanyak 4 x karena adanya refocusing anggaran dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus (Covid-19). Besarnya pemotongan anggaran pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA sebesar Rp 10.951.595.000,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga pagu anggaran Direktorat PPISDA setelah pemotongan sebesar Rp11.048.405.000,00 (sebelas milyar empat puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah).

Berdasarkan Renstra periode 2020 – 2024 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA pada tahun 2021 ini memiliki target sebanyak 14 output, dengan rincian : terdiri atas 7 rekomendasi kebijakan, 2 kesepakatan, 2 NSPK, dan 2 laporan. Sedangkan capaian kinerja

berdasarkan target renstra tersebut sebesar 13 output, dengan rincian 14 output, dengan rincian : terdiri atas 7 rekomendasi kebijakan, 1 draft perjanjian kerjasama/ kesepakatan, 1 Dokumen, 2 NSPK, dan 2 laporan. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
SASARAN PRORAM : MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif				
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan				
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR				
Output Kegiatan :				
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	2	2
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	1	1
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	4	3
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	REKOMENDASI KEBIJAKAN	1	1
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan	KESEPAKATAN	2	1
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	2	2
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA	Laporan	1	1
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	1	1

Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2021 antara Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dengan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur

Perumahan, Capaian kinerja yang telah di capai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar 24,25 % dari target sebesar 25 %.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Capaian Kinerja PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	25	24,25

Realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021 berdasarkan e-monitoring PUPR adalah sebesar Rp 10.022.757.000,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau setara dengan 90,72 % dari pagu yang diterima oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp 11.048.405.000,00. Sedangkan Realisasi fisik Direktorat PPISDA pada tahun anggaran 2021 ini sebesar 91,12 %

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (dlm ribuan)	Realisasi (dlm ribuan)	Keuangan		Fisik	
				RN	RL	RN	RL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Rp 11.048.405,-	Rp 10.022.757,-	100 %	90,72 %	100 %	91,12 %

Daftar ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xii
Pendahuluan	
Latar Belakang	1
Tugas dan Fungsi	2
Struktur Organisasi	3
Isu Strategis	6
Perencanaan Kinerja	
Uraian Singkat Rencana Strategis	11
Perjanjian Kinerja	19
Metode Pengukuran	22
Target Tahun 2021	6
Kapasitas Organisasi	
Sumber Daya Manusia	32
Sarana dan Prasarana	45
Daftar Isian Pelaksana Anggaran	48
Akuntabilitas Kinerja	
Capaian Kinerja	56
Perbandingan Capaian Kinerja	99
Realisasi Anggaran	104

Tindak Lanjut atas Rekomendasi Sakip TA. 2020	109
Analisis Efisiensi dan Efektifitas	117
Penutup	
Kesimpulan	119
Rekomendasi	120
Lampiran	

Daftar TABEL

2.1	Kontribusi Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terhadap Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.	15
2.2	Kontribusi Indikator 2 Sasaran Kegiatan 3 terhadap indikator 2 yang ada pada Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.	16
2.3	Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan bobot untuk perhitungannya	23
2.4	Target Kinerja tahun 2021 berdasarkan Renstra 2020 – 2024	24
2.5	Perbandingan Target antara RENSTRA dan DIPA	27
2.6	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	29
3.1	Akumulasi Pegawai Direktorat PPISDA	33
3.2	Rekapitulasi Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun anggaran 2021	37
3.3	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan	38
3.4	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	38
3.5	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan pendidikan	39
3.6	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	39
3.7	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	40
3.8	Pemetaan Kebutuhan Pegawai Direktorat PPISDA	43
3.9	Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti pegawai Direktorat PPISDA TA. 2021	45
3.10	Daftar Barang Milik Negara (BMN) Direktorat PPISDA TA. 2021	47
3.11	History Revisi DIPA Direktorat PPISDA selama tahun 2021 berdasarkan Rincian Outpu	49

3.12	History Revisi DIPA mulai dari DIPA awal, Revisi DIPA 1, Revisi DIPA 2, Revisi DIPA 3 berdasarkan paket kegiatan	50
3.13	History Revisi DIPA mulai dari Revisi DIPA 4, sampai dengan Revisi DIPA 6 berdasarkan paket kegiatan	51
3.14	History Revisi DIPA mulai dari Revisi DIPA 7, sampai dengan Revisi DIPA 9 berdasarkan paket kegiatan	52
4.1	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya berdasarkan Target Perjanjian Kinerja 2021	57
4.2	Capaian Kinerja berdasarkan status DIPA revisi terakhir Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya	58
4.3	Cascading capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya TA 2021	59
4.4	Target dan Capaian pada Rincian Output 1 (Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA)	62
4.5	Target dan Capaian pada Rincian Output 2 (Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA)	68
4.6	Target dan Capaian pada Rincian Output 3 (Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA)	71
4.7	Target dan Capaian pada Rincian Output 4 (Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA)	79
4.8	Target dan Capaian pada Rincian Output 5 (Proyek KPBU SDA yang siap di kerjasamakan)	82
4.9	Target dan Capaian pada Rincian Output 6 (NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA)	90
4.10	Target dan Capaian pada Rincian Output 7 (Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA)	94
4.11	Target dan Capaian pada Rincian Output 8 (Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA)	97
4.12	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja TA 2020 dengan TA 2021 berdasarkan Target Renstra	100
4.13	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja TA 2020 dengan TA 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja	101
4.14	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja TA 2020 dengan TA 2021 berdasarkan Realisasi anggaran E-monitoring Online 31 Desember	103

	2021, pukul 16.00 WIB	
4.15	Tabel Realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output sesuai Emonitoring Online status 31 Desember 2021	104
4.16	Tabel Realisasi anggaran berdasarkan Komponen sesuai Emonitoring Online status 31 Desember 2021	106
4.17	Tabel Realisasi anggaran perbulan selama TA 2021 berdasarkan Rincian Output	108
4.18	Tindak Lanjut atas rekomendasi laporan kinerja tahun 2020	114
4.19	Komponen, Bobot dan nilai hasil evaluasi SAKIP TA 2020 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	115
4.20	Rekomendasi Evaluator terhadap evaluasi SAKIP 2020 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	116

Daftar GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Baru Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4
2.1	Perjanjian Kinerja Awal	20
2.2	Perjanjian Kinerja Revisi 1	20
2.3	Perjanjian Kinerja Revisi 2	21
2.4	Perjanjian Kinerja Revisi 3	22
3.1	Presentasi Pegawai PPISDA berdasarkan kelompok	33
3.2	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan	38
3.3	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	38
3.4	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan	39
3.5	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia	39
3.6	Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	40
3.7	Ruang Kerja dan Ruang Rapat Direktorat PPISDA	47
4.1	Kronologis Anggaran Komponen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	63
4.2	Kronologis Anggaran Komponen Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	67
4.3	Kronologis Anggaran Komponen Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air Berdasarkan Paket Kegiatan	68
4.4	Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Kunjungan lapangan Proyek KPBU SPAB Kuwil, Sulawesi Utara	72
4.5	Kronologis Anggaran Komponen Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	72
4.6	Dokumentasi Penjajakan Minat Pasar Proyek KPBU SPAB Kuwil Terintegrasi Dengan SPAM Regional Bimantara, Sulawesi Utara	73
4.7	Dokumentasi Market Consultation Proyek KPBU Bendungan	77

	Bodri, Jawa Tengah	
4.8	Kronologis Anggaran Komponen Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Berdasarkan Paket Kegiatan	78
4.9	Kronologis Anggaran Komponen Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	80
4.10	Kronologis Anggaran Komponen Pelaksanaan dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	83
4.11	Dokumentasi Rapat Persiapan Rancangan Proyek Perubahan Strategi Percepatan PenyediaanInfrastruktur SDA dengan Skema KPBU melalui Penyediaan Sistem Terintegrasi Sektor SDA	85
4.12	Kronologis Anggaran Komponen Pelaksanaan Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	87
4.13	Dokumentasi Rapat Rivi Rancangan Dokumen Perjanjian Kerja Sama Proyek KPBU Unsolicited Pemeliharaan Bendungan dan Bangun Guna Serah PLTM Bintang Bano	89
4.14	Kronologis Anggaran Paket kegiatan Penyusunan Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Berbasis Aplikasi	92
4.15	Kronologis Anggaran Paket kegiatan Penyusunan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Sektor Sumber Daya Air	93
4.16	Kronologis Anggaran pada Komponen Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	95
4.17	Kronologis Anggaran pada Komponen Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	98
4.18	Sandingan Rencana VS Realisasi Keuangan perbulan selama TA 2021	107
4.19	Kursa S Rencana VS Realisasi Fisik perbulan selama TA 2021	107



BAB 1

PENDAHULUAN

Pendahuluan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyusun laporan kinerja tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang terukur (akuntabel) dan transparan

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu prasyarat dalam menciptakan pemerintah yang baik dan terpercaya, hal tersebut dapat terwujud dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya di sebut SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang di rancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat satuan kerja/unit kerja, unit organisasi sampai tingkat kementerian/lembaga. Kinerja disini merupakan hasil/output dari suatu kegiatan/program yang telah maupun hendak di capai, dari mulai dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, laporan kinerja sampai dengan review dan evaluasi kinerja sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur dengan jelas, Demikian hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden no 29 tahun 2014.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur sumber daya air, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang merupakan salah satu unit eselon II dalam Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menjabarkan secara khusus tugas dan tanggung jawab yang diemban dengan menyusun kegiatan-kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan sesuai program yang telah ditetapkan disusun sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon III di Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur

Sumber Daya Air dan dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis Direktorat ini memuat program, kegiatan, dan sasaran kegiatan eksisting serta kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi.

Implementasi tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, mendukung tugas dan fungsi berdasarkan kepada anggaran yang telah tercantum dalam DIPA. Keseluruhan aktivitas yang dilakukan unit kerja yang menggunakan dana APBN di lingkungan pemerintahan wajib dipantau dimulai dari perencanaan berupa target-target yang hendak diraih baik target fisik maupun target keuangan, proses penyelenggaraan/ pelaksanaan aktivitas dan kegiatan, capaian-capaian yang berhasil diraih baik secara fisik maupun secara keuangan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja berikut tindak lanjut kinerja kedepannya. Keseluruhan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 pasal 545, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu sebagai berikut:

Kedudukan:

Unit kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Tugas

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Fungsi

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas yang tersebutkan di atas, dibutuhkan fungsi dalam menyelenggarakannya :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- c. koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air
- d. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- e. pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja terdiri atas 2 subdirektorat dan satusubagian tata usaha. Adapun 2 Subdirektorat tersebut yaitu Subdirektorat Legalisasi

Rencana Investasi dan Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi .Berikut ini merupakan Struktur Organisasi baru tertuang dalam Gambar 1.



Gambar 1.3.
Struktur Organisasi Baru Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dibantu oleh:

1.3.1 Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan,

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan legalisasi rencana investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), diantaranya :

1. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
2. JF Analis Kebijakan Ahli Pertama
3. JF Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama
4. JF Analis Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Ahli Pertama

1.3.2 Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi

Subdirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan percepatan Kerjasama pemerintah dan badan usaha, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi Kerjasama investasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional (JF), diantaranya :

1. JF Analis Kebijakan Ahli Madya
2. JF Analis Kebijakan Ahli Muda
3. JF Pranata Humas Ahli Muda
4. JF Analis Kebijakan Ahli Pertama
5. JF Teknik Pengairan Ahli Pertama

1.3.3 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

1.4 Isu Strategis

Pada tahun kedua Renstra 2020-2024, Direktorat pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air menghadapi berbagai isu-isu ataupun kendala dalam mencapai target kinerja sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Renstra tersebut. Berikut ini merupakan isu-isu strategis pada Direktorat Pelaksanaan pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Isu-isu dan kendala tersebut yaitu:

1. Perencanaan penyediaan infrastruktur SDA masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema APBN;
2. Belum adanya kriteria proyek KPBU sektor SDA di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
4. Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU;
5. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
6. Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
7. Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN;
8. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK;
9. Ketersediaan lahan yang *clear* dan *clean* untuk proyek KPBU;
10. Dinamisasi perubahan proyek KPBU Sektor SDA dibatalkan, ditunda maupun diganti proyek baru dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bendungan muara Juloi, Bendungan Matenggeng, Bendungna Warsamson, Bendungan Selamayu dikeluarkan dari daftar Proyek KPBU SDA 2020 – 2024 berdasarkan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA , Ditjen SDA NO. SA.01-Aj/176a tanggal 24 Maret 2021, (surat terlampir);
 - b. SPAB Sindang Heula diganti dengan SPAB Kedunglanggar berdasarkan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA No. PR.02.01-Aj329 tanggal 5 Mei 2021, (surat terlampir)
 - c. SPAB Sorong diganti dengan SPAB Kuwil berdasarkan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA No. PR.02.01-Aj/329 tanggal 5 Mei 2021, (surat terlampir);
 - d. Di Karangnongko dikeluarkan dari daftar proyek KPBU SDA 2020-2024 berdasarkan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA No. PR.01.02-Aj/459 tanggal 16 juni 2021, (surat terlampir);
11. Adanya perubahan proyek KPBU dari *Solicited*, menjadi *Unsolicited* dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. SPAB Sidan, diintegrasikan menjadi Proyek KPBU Unsolicited SPAB Sidan dan SPAM Ayung I;
 - b. SPAB Karian Barat, diintegrasikan menjadi Proyek KPBU Unsolicited SPAB dan SPAM Karian Barat.
12. Belum ada proyek KPBU SDA yang siap dilelangkan dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Proyek KPBU sektor SDA yang saat ini memasuki tahap awal transaksi adalah proyek KPBU Unsolicited pemeliharaan Bendungan dan Bangun Guna Serah PLTM Bintang Bano, Namun berpotensi mundur ke 2022 apabila *outstanding issues* a.1 perihal tariff pembelian listrik oleh PLN dan RPP turunan UU SDA yang membolehkan kegiatan pemeliharaan oleh badan usaha swasta belum dapat ditetapkan sebelum lelang KPBU;
 - b. Proyek KPBU bendungan Merangin saat ini masih dalam tahap penyusunan surat penugasan SMI untuk penyusunan FBC sehingga rencana pelaksanaan lelang mundur dan ditargetkan pada Q3 tahun 2022;

- c. Di Karangnongko, dikeluarkan dari daftar proyek KPBU SDA 2020-2024 berdasarkan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA, Ditjen SDA No. PR.01.02-Aj/459 tanggal 16 juni 2021, (*surat terlampir*);
 - d. Telah melaksanakan Rapat Finalisasi Penyusunan FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri pada 2 Desember 2021;
 - e. Sedang dalam tahap pembahasan isu-isu yang perlu ditindaklanjuti dalam penyiapan KPBU Bendungan Bodri bersama Konsultan Penyusun FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri;
 - f. Telah melaksanakan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan OBC Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimataru pada 29 November 2021;
 - g. Penyusunan OBC Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimataru ditargetkan selesai pada Desember 2021;
13. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat Covid 19 dan PPKM, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Dengan ditetapkannya PPKM kegiatan survei, RDS, konsultasi public dan FGD banyak yang tertunda;
 - b. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan dari tatap muka menjadi *video conference*.
14. Kepastian kemampuan fiskal Kementerian PUPR selaku PJPK dalam pembayaran atas ketersediaan layanan (*Availability Payment*) mengingat tingginya *Multi Years Contract* di Ditjen SDA;
15. Bentuk skema kerja sama KPBU terhalang UUD pasal 33 ayat (3) dan UU SDA Nomor 17/2019 pasal 57 ayat (8), sehingga menghambat penyusunan dokumen penyiapan;
16. Belum ada best practice proyek *multi purpose* infrastruktur SDA dengan skema KPBU yang mencapai tahap transaksi.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja

Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis dan bersifat indikatif. Renstra unit kerja/unit pelaksana teknis memuat hal-hal strategis dan operasional sektor yang menjadi tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian sasaran program unit organisasi.

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra Kementerian PUPR berkedudukan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), di mana dalam penyusunan Renstra K/L harus berpedoman pada RPJMN. Selain itu, Renstra Kementerian PUPR juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja K/L). Penyusunan Renja K/L juga dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran target tahunan RPJMN.

Selanjutnya dokumen Renja K/L yang telah tersusun, menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam penyusunan RKA K/L. RKA K/L yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dokumen Renstra Kementerian dijabarkan ke dalam target tahunan yaitu Renja K/L dan kemudian dijadikan acuan di dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) diterbitkan. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Perjanjian Kinerja memuat indikator kinerja sesuai dengan Renstra dan anggaran sesuai dengan DIPA.

Target di dalam Perjanjian Kinerja kemudian dijabarkan menjadi target bulanan dalam bentuk dokumen Rencana Aksi Kinerja dan akan dipantau serta dievaluasi setiap bulan yang

tertuang di dalam dokumen Monev Kinerja Bulanan. Proses perencanaan kinerja tingkat kementerian di atas juga berlaku sama dengan lingkup di bawahnya, dari Unit organisasi, unit kerja maupun satuan kerja. Dari kementerian kemudian akan turun ke unit organisasi, unit kerja kemudian ke satuan kerja jika ada. Adapun pada akhir tahun maka masing-masing pelaksana anggaran dari mulai tingkat kementerian, unit organisasi, maupun unit kerja akan disusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja akan membandingkan kinerja antara target yang telah tercantum di dalam Perjanjian Kinerja dengan capaiannya.

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Capaian pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2015-2019 dalam bidang Sumber Daya Air adalah pembangunan 29 bendungan baru sebagai bagian dari rencana pembangunan 65 bendungan 2015-2019, sehingga kapasitas tampung per kapita meningkat menjadi 59,91 m³/detik. Dengan tambahan bendungan baru tersebut, layanan air irigasi untuk 12,5% lahan sawah beririgasi di Indonesia dapat dilayani oleh waduk. Selain itu, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, telah dibangun 0,99 juta Ha irigasi baru dan rehabilitasi pada 2,9 juta Ha irigasi eksisting. Dalam rangka mendukung akses air minum universal, pembangunan bendungan baru menambah kapasitas air baku sebesar 24,9 m³/detik.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan PDB scenario menengah dalam RPJMN 2020-2024, kebutuhan belanja infrastruktur diperkirakan mencapai Rp.6.445 Triliun. Akan tetapi, kemampuan penyediaannya hanya sebesar 3,46% dari PDB sehingga terdapat gap cukup signifikan dalam pendanaan infrastruktur. Untuk itu diperlukan upaya kreatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, pembangunan 18 waduk multiguna menjadi salah satu major project dengan indikasi pendanaan sebesar Rp.201, 5

Triliundimana Rp.47,5 Triliun dipenuhi oleh APBN, Rp.90 Triliun dipenuhi oleh KPBU, dan Rp.64 Triliun dipenuhi oleh swasta. Manfaat dari major project ini adalah tersedia nyapasokan air baku dari waduk sebesar 23,5 m3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW dan tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang kemudian diperbarui karena adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja kementerian sehingga pengaturan terkait pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan perlu diganti menjadi Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR, jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan terdiri atas : (1) Infrastruktur jalan (2) Infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi; (3) Infrastruktur air minum; (4) infrastruktur air limbah terpusat; (5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; (6) Infrastruktur system pengelolaan sampah; (7) Infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan seperti pasar; (8) Infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan; (9) Infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; (10) Infrastruktur perumahan rakyat; (11) Infrastruktur bangunan negara berupa perkantoran, rumah negara dan sarana pendukung lainnya.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan salah satu Unit Kerja di DJPI yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung Unor Teknis (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air) untuk melaksanakan major project yang tercantum dalam Rancangan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dukungan tersebut terkait dengan pembiayaan infrastruktur melalui Skema KPBU sektor sumber daya air.

TUJUAN

“ Meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka mendukung pemenuhan infrastruktur Sumber Daya Air “

2.1.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai. Sasaran kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan kedalam langkah-langkah yang lebih rinci. Penjabaran ini dilakukan guna mempermudah pencapaian tujuan.

Sasaran kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya fasilitasi tahapan penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan dan evaluasi 9 proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air, antara lain 6 proyek bendungan, 2 proyek SAB, dan 1 proyek daerah irigasi;
2. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air; dan
3. Terlaksananya layanan perkantoran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA.

Direktorat PPI SDA perlu mendampingi dan membantu pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur SDA yang terdiri dari 6 proyek bendungan, 2 proyek SAB, dan 1 proyek daerah irigasi pada periode 2020-2024. Tidak hanya pemenuhan pembiayaan, direktorat perlu memfasilitasi proyek KPBU. Fasilitasi dilakukan mulai dari tahap penyiapan, perencanaan, transaksi, pemantauan, hingga evaluasi. Hal ini berarti PPI SDA tidak hanya memastikan biaya proyek terpenuhi, namun juga proyek yang dijalankan dengan skema KPBU perlu untuk didampingi hingga proses evaluasi.

Selain itu, pelayanan perkantoran juga penting untuk diperhatikan. Layanan perkantoran perlu dilaksanakan untuk memastikan operasionalisasi berjalan.

Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan sumber pembiayaan infrastruktur sumber daya air melalui skema KPBU, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA perlu melaksanakan tiga poin yang tercantum dalam sasaran yang telah ditetapkan di atas. Pelaksanaan sasaran membutuhkan arahan kebijakan dan strategi agar tugas dan fungsi direktorat tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan (terkait arahan kebijakan dan strategi akan dijelaskan pada bab selanjutnya). Jika pelaksanaan fasilitasi proyek KPBU, pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek, dan pelayanan perkantoran dapat dicapai, maka Direktorat PPI SDA telah mampu mendukung pemenuhan infrastruktur SDA.

Detail manual Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan persentase perhitungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang ikut berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal pembiayaan Infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung Sistem Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif.	<p>IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%) 	<p>IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:</p> <p>Indikator 1 (30%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. <p>Indikator 2 (70%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan Pembiayaan infrastruktur SDA, Jalandan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) 		Internal dan Eksternal

Tabel 2.1 Kontribusi Sasaran Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terhadap Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

SASARAN	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SK 3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	komposit dari indikator 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur (%) 2. Tingkat Implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur Sumber Daya Air (%)	IKSP2, dihitung Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (50%) 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target. Indikator 2 (50%) 2. Jumlah paket KPBU Sumberd Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target.		Internal dan Eksternal

Tabel 2.2 Kontribusi Indikator 2 Sasaran Kegiatan 3 terhadap indikator 2 yang ada pada Sasaran Program 1 Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur.

Sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 2020-2024, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air ikut berkontribusi dalam mencapai target Sasaran Program seperti yang terlihat pada tabel kinerja yang terdapat Sasaran Program 1, Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang mana turunannya adalah Sasaran Kegiatan Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan. Indikator 2 pada Sasaran Program dengan nilai bobot sebesar 70 %, maka turunannya terdapat pada indikator 2 yang ada di Sasaran Kegiatan Direktorat PPISDA dengan bobot nilai sebesar 50 %. Dimana dalam 50 % ini adalah nilai dari paket KPBU yang siap dikerjasamakan.

2.1.1 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis dalam rangka mendukung dan percepatan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air di tingkat pusat dan daerah;
- c) Peningkatan kontribusi dan manfaat pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- d) Pengembangan sumber pendanaan dan skema pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan;
- e) Percepatan Kerjasama pemerintah dan badan usaha pada pembiayaan infrastruktur sumber daya air dengan mendorong partisipasi masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan terkait;
- f) Pendampingan Badan Usaha dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur sumber daya air;
- g) Memastikan dan mendorong peningkatan kualitas penyediaan dan operasional infrastruktur sumber daya air yang melalui skema KPBU;

2.1.2 Strategi

Strategi Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pembentukan Tim KPBU untuk sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan KPBU pada tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, monitoring, dan evaluasi;
- b) Peningkatan koordinasi dengan Unit Organisasi Teknis untuk mengidentifikasi proyek-proyek infrastruktur sumber daya air yang akan dibiayai dengan skema KPBU dan terkait penerbitan dokumen izin lingkungan dan pembebasan lahan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;

- c) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya terkait penentuan PJPK untuk proyek-proyek yang akan dibiayai dengan skema KPBU;
- d) Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pembangunan dan operasional infrastruktur sektor sumber daya air;
- e) Mengembangkan system teknologi informasi dalam rangka memberikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air;
- f) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek unsolicited;
- g) Melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No. 50 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk membahas tentang mekanisme dan konsep kerjasama pembelian tenaga listrik;
- h) Melakukan kajian terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya No. 55 tahun 2019 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk menyepakati perhitungan pendapatan dari listrik dan harga jual listrik PT. PLN (Persero) kepada masyarakat.
- i) Pemanfaatan bendungan multiguna baru yang memiliki potensi sebagai pembangkit listrik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- j) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan yang terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air;
- k) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pendayagunaan sumber daya air dalam pemenuhan kebutuhan air baku untuk air bersih, diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis; dan

- I) Pemberian dukungan terkait dengan pembiayaan untuk pengendalian daya rusak terutama dalam hal penanggulangan banjir yang dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konsevasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan kawasan strategi

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kerja yang berisikan perjanjian antara Pihak yang diberikan tanggung jawab (dalam hal ini Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air) dengan Pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur). Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama satu tahun kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun setelah adanya alokasi pagu anggaran yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana yang ada. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA Tahun Anggaran 2021 terkait pelaksanaan program dengan target yang ingin di capai.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada awal tahun 2021 telah menetapkan perjanjian kinerja yang mencakup 1 sasaran kegiatan dengan nilai anggaran sebesar Rp 22.000.000.000,- Sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-033.16.1.631003/2021 tanggal 28 Nopember 2020, Pagu anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sebesar Rp 22.000.000.000,-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN


SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASLINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>	24,56%	25%

KEGIATAN
 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

ANGGARAN
 Rp22.000.000.000,00

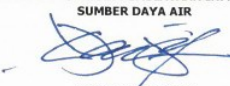
JAKARTA, JANUARI 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



EKO D. HERIPRANTO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR



ARVI ARGANTORO

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Pada bulan Februari terjadi refocusing anggaran sebesar Rp 7.097.621.000,- Sehingga pagu yang semula sebesar Rp 22.000.000.000,- berkurang menjadi Rp 14. 902.379.000,-. Berikut tampilan Perjanjian Kinerja Ditrektorat PPISDA revisi 1 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI


SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASLINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>	24,56%	25%

KEGIATAN
 Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

ANGGARAN
 Rp14.902.379.000,00

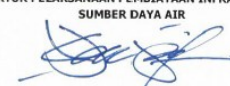
JAKARTA, FEBRUARI 2021

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



EKO D. HERIPRANTO

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR



ARVI ARGANTORO

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Revisi 1

Pada bulan Agustus terjadi refocusing anggaran ke 2 sebesar Rp 1.068.831.000,- Sehingga pagu yang semula sebesar Rp 14. 902.379.000,- berkurang menjadi Rp 12.048.405.000,- Dalam Perjanjian Kinerja Revisi II ini juga telah di tanda tangangi oleh Dirjen baru yang dilantik pada bulan Agustus 2021, Bapak Herry Trisaputra Zuna. Berikut tampilan Perjanjian Kinerja Ditrektorat PPISDA revisi 2 :

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>	24,56%	25%

KEGIATAN
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

ANGGARAN
Rp12.048.405.000,00

JAKARTA, AGUSTUS 2021

**DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR**


ARVI ARGYANTORO

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Revisi 2

Pada bulan Nopember terjadi refocusing anggaran ke 3 sebesar Rp 1.000.000.000,- Sehingga pagu yang semula sebesar Rp 12.048.405.000,- berkurang menjadi Rp 11.048.405.000,-. Berikut tampilan Perjanjian Kinerja Ditrektorat PPISDA revisi 3 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2020	TARGET
(1)	(2)	(3)
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif</i>	98,93%	100%
SK. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan		
<i>IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air</i>	24,56%	25%

KEGIATAN

Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

DIREKTUR JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

ANGGARAN

Rp11.048.405.000,00

JAKARTA, NOVEMBER 2021

DIREKTUR PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SUMBER DAYA AIR



ARVI ARGYANTORO

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Revisi 3

2.3 Metode Pengukuran

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Kinerja suatu organisasi bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria/indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Indikator keberhasilan biasanya dikaitkan dengan target-target tertentu yang akan dicapai.

Indikator kegiatan (Output) merupakan indikator yang di gunakan untuk menilai keberhasilan dalam capaian kinerja dan output yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Penetapan indikator dilakukan dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga mudah untuk diukur, mudah untuk dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan. Indikator Kinerja Utama Output Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA;
2. Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA;

3. Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA;
4. Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA;
5. Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan;
6. NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA;
7. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA;
8. Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA.

Metode pengukuran yang dilakukan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air berpedoman pada perhitungan yang terdapat dalam Tabel Renstra Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur tahun 2020 - 2024. Sasaran Kegiatan yang ada di Renstra DJPI saling terintegrasi dari Unit kerja yang satu ke unit kerja yang lain, sehingga mengakibatkan adanya sharing dalam pencapaian sasaran kegiatannya. Berikut ini adalah Tabel Indikator Sasaran Kegiatan dan Cara Perhitungannya berdasarkan Renstra Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR		METODE PERHITUNGAN
SK 03	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyusunan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Komposit dari indikator-indikator Pelaksanaan Penyusunan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Penjumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyusunan Pembiayaan Infrastruktur SDA sbb :
			1.	Tingkat Implementasi kegiatan perencanaan dan penyusunan paket pembiayaan Infrastruktur SDA (%)	Indikator 1 (50%) : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan SDA yang disusun dibandingkan dengan target
			2.	Tingkat implementasi kegiatan transaksi paket pembiayaan infrastruktur SDA	Indikator 2 (50%) : Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target

(Sumber Renstra DJPI)

Tabel 2.3 Indikator Sasaran Program, Kegiatan dan bobot untuk perhitungannya

2.4 Target Tahun 2021

2.4.1 TARGET TAHUN 2021 menurut RENSTRA

Salah satu turunan dari RENSTRA Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah RENSTRA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dimana di dalamnya terdapat rencana Target selama 5 tahun masa renstra. Berikut ini adalah Target yg telah direncanakan dalam Renstra Direktorat Jenderal maupun RENSTRA Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air di tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM/IKSP/SK/IKK/OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			SATUAN	TARGET RENSTRA
SASARAN PROGRAM : MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				
IKSP : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung system, kebijakan pembiayaan yang efisien dan efektif				
Sasaran Kegiatan : meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR				
Output Kegiatan :				
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	2
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	1

	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	4
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	3
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	1
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan		Kesepakatan	1
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	1
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Kesepakatan	2
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA		NSPK	2
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	2
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA		Laporan	1
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	1
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA		Laporan	1
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	1

Tabel. 2.4. Target Kinerja tahun 2021 berdasarkan Renstra 2020 – 2024

(Sumber Renstra DJPI)

2.4.2 Perbandingan Target RENSTRA dan DIPA

Salah satu yang menjadi pedoman dalam dalam menyusun DIPA adalah Renstra. Sesuai target yang ada pada Renstra DJPI yang kemudian diturunkan menjadi Renstra Direktorat PPISDA, yang kemudian dituangkan lagi kedalam DIPA. Dapat dilihat dalam tabel 2.3 jumlah output pada renstra dengan DIPA sesuai. Sedangkan jumlah target dalam DIPA sedikit lbh banyak jika di bandingkan dengan target Renstra. Namun mengingat banyak nya kendala dan permasalahan salah satunya refocusing anggaran mengakibatkan target Direktorat mengalami perubahan. Sehingga diterbitkan lah DIPA revisi untuk perubahan pagu anggaran dan target. Berikut ini perbandingan Target Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tahun 2021 antara RENSTRA , DIPA tahun 2021 dan Revisi DIPA, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN				SATUAN	BOBOT	TARGET RENSTRA 2021	TARGET DIPA 2021	TARGET REVISI DIPA 2021
SASARAN PRORAM : MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA								
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif								
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan								
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air								
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR								
Output Kegiatan :								
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA			Rekomendasi Kebijakan		2	2	2
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	50%	1	1	1
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	50%	1	1	1
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA			Rekomendasi Kebijakan		1	2	1
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	100%	1	2	1
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA			Rekomendasi Kebijakan		4	5	4
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	40%	1	4	1
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	60%	3	1	3
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA			Rekomendasi Kebijakan		1	1	1
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan	100%	1	1	1
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan			Kesepakatan		2	2	2
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA		Dokumen	40%	1	1	1
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA		Kesepakatan	60%	2	2	2
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA			NSPK		2	2	2
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA		NSPK	100%	2	2	2
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA			Laporan		1	2	1
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Laporan	100%	1	2	1
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA			Laporan		1	1	1
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Laporan	100%	1	1	1
TOTAL						14	17	14

Tabel. 2.5 Perbandingan Target antara RENSTRA dan DIPA

2.4.1 KERANGKA PENDANAAN

Seperti halnya target kinerja. Rencana anggaran dalam kementerian lembaga ataupun suatu organisasi pemerintah telah di rencanakan dalam Rencana strategi yang memiliki periode selama 5 tahun yang dikenal dengan sebutan RENSTRA. Kebutuhan pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA pada tahun anggaran 2021 juga telah direncanakan dalam Renstra Direktorat PPISDA periode 2020 – 2024. Berikut ini tabel kerangka pendanaan yang terdapat dalam renstra tersebut :

(Sumber data: Rencana Strategis Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2020-2024)

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL	
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN																
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan																
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air																
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR																
Output Kegiatan :				20	14	20	21	22	98	11,043	16,000	47,290	43,125	44,050	143,508	
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA			REKOMENDASI KEBIJAKAN	4	2	3	4	4	17	1,893	1,200	3,100	4,725	5,150	16,068
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN	2	1	1	1	1	6	1,368	600	600	700	800	4,068
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN	2	1	2	3	3	11	525	600	2,500	4,025	4,350	12,000
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA			REKOMENDASI KEBIJAKAN	1	1	1	2	2	7	946	2,400	600	2,400	2,400	8,746
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN	1	1	1	2	2	7	946	2,400	600	2,400	2,400	8,746
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA			REKOMENDASI KEBIJAKAN	3	4	4	3	4	18	3,603	5,250	31,900	23,600	23,600	69,953
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN	2	1	2	2	2	9	2,803	1,200	14,400	2,000	14,000	34,403
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN	1	3	2	1	2	9	800	4,050	17,500	3,600	9,600	35,550
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA			REKOMENDASI KEBIJAKAN	1	1	1	1	1	5	457	700	1,000	1,000	1,200	4,357
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA		REKOMENDASI KEBIJAKAN	1	1	1	1	1	5	457	700	1,000	1,000	1,200	4,357

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			SATUAN	TARGET RENSTRA					TOTAL	ANGGARAN (Juta Rupiah)					TOTAL
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN															
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan															
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air															
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR															
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan		KESEPAKATAN	3	2	4	4	4	18	1,469	4,000	5,090	5,500	5,800	21,859
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	2	1	2	2	2	9	980	1,000	2,440	2,600	2,750	9,770
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9	489	3,000	2,650	2,900	3,050	12,089
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA		NSPK	4	2	2	2	2	12	1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	4	2	2	2	2	12	1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA		Laporan	3	1	4	4	4	16	960	950	3,500	3,800	3,800	13,010
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	3	1	4	4	4	16	960	950	3,500	3,800	3,800	13,010
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA		Laporan	1	1	1	1	1	5	176	300	300	300	300	1,376
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	1	1	1	1	1	5	176	300	300	300	300	1,376

Tabel 2.6 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021

Menindaklanjuti rencana anggaran yang ada di renstra dan kemudian dibuatlah DIPA yang diterbitkan setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2021, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami Revisi DIPA sebanyak delapan kali. Sedangkan pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mengalami 4x Revisi DIPA. Alasan adanya Revisi, dikarenakan adanya Refocusing anggaran dalam rangka menghadapi Bencana Nasional yaitu

Covid. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 dan surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor KU.02-Mn/124 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penyampaian Rekapitulasi Penghematan Belanja Kementerian PUPR TA 2021, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengalami penghematan/pemotongan anggaran. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melakukan penghematan anggaran dari belanja perjalanan dinas, belanja bahan, belanja konsultan dan belanja jasa profesi. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 25/SE/M/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran di Masa Tatanan Normal Baru di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, masing-masing Unit Organisasi diperbolehkan untuk mengalokasikan biaya penambah daya tahan tubuh dan biaya pemeriksaan kesehatan pegawai.



BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

Kapasitas Organisasi

Dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang telah diamanatkan dalam Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, dibutuhkan sumber daya yang harus dapat berkolaborasi dan saling melengkapi. Ada 3 golongan sumber daya yang masuk dalam kapasitas organisasi ini, yaitu 1). Sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas ; 2). Sarana dan Prasarana ; dan 3). Anggaran yang telah disediakan.

3.1 Sumber Daya Manusia

Usaha Pemerintah dalam mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, maka diperlukan Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Pokok-Pokok Kepegawaian juga disebutkan dalam undang-undang di maksud di mana perlu mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme .

Dalam mencapai tujuan di atas, dibutuhkan sebuah sistem untuk pengelolaan pegawai Negeri sipil yang disebut “Manajemen Pegawai Negeri Sipil”. Manajemen Pegawai Negeri Sipil merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.

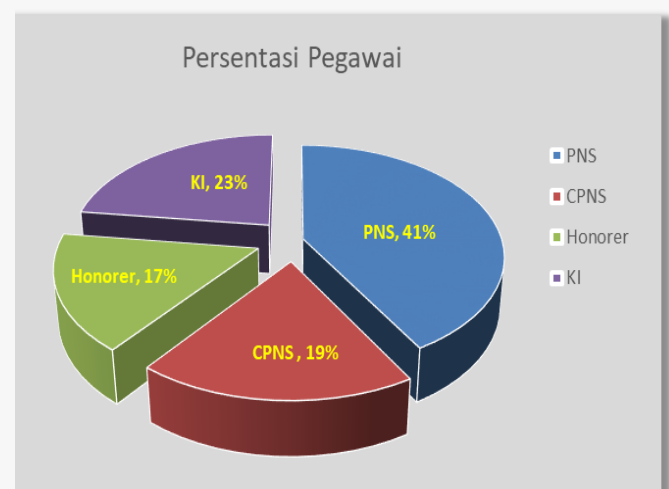
Pada dasarnya, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan professional dibidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu

mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, perlu dilakukan penyusunan roadmap pengembangan sumber daya manusia dengan terencana dan terstruktur. Hal demikian selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo agar pada Pegawai Negeri Sipil membudayakan core value Aparatur Sipil Negara (ASN), BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai dasar ini diharapkan mampu menciptakan generasi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki semangat berkarya, berkualitas serta profesional dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA) membutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) Untuk mencapai target kinerjanya. Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun anggaran 2021 sebanyak 48 orang. Terdiri dari 20 orang PNS, 9 orang CPNS, 8 Pegawai Honorer/Tenaga Penunjang, 11 pegawai Konsultan Individual. Namun yang masih aktif di kantor sebanyak 47 orang dikarenakan ada 1 orang Pelaksana PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan Negara. Berikut ini tabel dan grafik Persentasi Pegawai beserta daftar nama Pegawai Direktorat PPISDA TA. 2021 sebagai berikut :

NO	Pegawai	Jumlah
1	PNS	20
2	CPNS	9
3	Honorer	8
4	Kons. Individual	11
TOTAL		48

Tabel 3.1 Akumulasi Pegawai Direktorat PPISDA



Gambar 3.1 Presentasi Pegawai PPISDA berdasarkan kelompok

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NIP/NRK	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Ir. Arvi Argyantoro, MA	L	196409121991031002	IV/d (Pembina Utama Madya)	Direktur PPISDA
SUB SUDIREKTORAT LEGALISASI RENCANA INVESTASI					
2	Acep Atmaja, S.ST., MT.	L	196603171990091001	IV/a (Pembina)	Kasubdit Legalisasi Rencana Investasi
3	Ika Agus Pawiyarti, ST	P	198408132009122002	III/d (Penata Tk I)	SKBT Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air/ Analis Kebijakan Ahli Muda
4	Arif Widiyanto, SE	L	198510182009121002	III/d (Penata Tk I)	SKBT Penyiapan Insvestasi Sumber Daya Air/ Analis Kebijakan Ahli Muda
5	Ethana Rahmaini Putri W, SE	P	199407232019032009	III/a (Penata Muda)	Analis Kebijakan Ahli Pertama
6	Saufika Hanjani, S.Tr.M	P	199604212019032011	III/a (Penata Muda)	Analis Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Ahli Pertama
7	Luqman Afif Khairuddin, S.ST	L	199412042019031006	III/a (Penata Muda)	Analis Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Ahli Pertama
8	Teddy Marza Kurniawan, SH	L	199103092019031009	III/a (Penata Muda)	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama
9	Yuni Arta Brilliani, S.AB., M.B.A.	P	199506092020122008	III/b (Penata Muda Tk. I)	Analis Kebijakan Ahli Pertama, CPNS
10	Antonius Simbolon, M.Si.	L	198809222020121004	III/b (Penata Muda Tk. I)	Analis Kebijakan Ahli Pertama, CPNS
11	Fajar Abdiansyah, SE., M.E.	L	198912162020121003	III/b (Penata Muda Tk. I)	Analis Kebijakan Ahli Pertama, CPNS
12	Putri Irina Mayang Sari, S.E., M.Si	P	199006282020122005	III/b (Penata Muda Tk. I)	Analis Kebijakan Ahli Pertama, CPNS

13	Berny Valayo, S.Kom	L	H05041983092018001	III/a (Penata Muda)	Penyusunan Monev dan Pelaporan
14	Esa Agung Hartono, SH	L	H18041980092018001	III/a (Penata Muda)	Penelaah Kebijakan
15	Muhammad Hardyan P, S.Ars.	L	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
16	Reynard Nathaniel, ST	L	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
17	Rasty Hikmahwaty	P	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
18	Ulqi Hibar Nadiyah	P	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
SUB SUDIREKTORAT KOORDINASI KERJASAMA INVESTASI					
19	Arfin, ST, MT	L	197006111998031003	IV/b (Pembina Tk I)	Kasubdit Koordinasi Kerjasama Investasi
20	Nanik Yulia Widiyanti, S.E.I	P	198007272008022003	III/d (Penata Tk I)	SKBT Dukungan dan Penyiapan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air / Analisis Kebijakan Ahli Muda
21	Ishaq Al Kindy, ST	L	198311032009121001	III/d (Penata Tk I)	SKBT Pendampingan dan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air/ Analisis Kebijakan Ahli Muda
22	Muchlis Ahmad Tri S, S.Si	L	199212022018021001	III/a (Penata Muda)	Teknik Pengairan Ahli Pertama
23	Dahwin Ferry Harahap, SE	L	199204282019031007	III/a (Penata Muda)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
24	Dias Shinta Devi, S.Tr.M	P	199604182019032010	III/a (Penata Muda)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
25	Achmad Sofwan, S.E, M.Sc	L	198810292020121001	III/b (Penata Muda Tk. I)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, CPNS
26	Christy Januari Sinurya, M.Si	P	199101172020122003	III/b (Penata Muda Tk. I)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, CPNS
27	Restu Wahyuni, S.E., M.B.A.	P	199301042020122005	III/b (Penata Muda Tk. I)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, CPNS

28	Fatoni Imam Wibowo, S.E., M.M.	L	199501232020121004	III/b (Penata Muda Tk. I)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, CPNS
29	Neny Febriyanti	P	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
30	Ganis Erlia Angesti, SE	P	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
31	R.A.Khoiri Lulu Najmi	P	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
32	Andika Zuhdi Ramdani, ST	L	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
33	Elwin Zanur, S.Sos	L	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
34	Dwiki Hermawan, S.Si	L	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
35	Taufik Akbar	L	Tenaga Ahli	III/a (Penata Muda)	–
SUB TATA USAHA					
36	Dwi Hanani Setyawati, SE	P	196706221997032001	III/d (Penata Tk I)	Kasubag Tata Usaha
37	Suryanto	L	198004032009111001	II/c (Pengatur)	Arsiparis
38	Vamella Yunny C, SH, MH	P	H21061992092018001	III/a (Penata Muda)	Penelaah Kebijakan
39	Fiyandi Ardiyansyah, SE,Sy	L	H27111984062018001	III/a (Penata Muda)	Penelaah Tata Naskah
40	Syafaat Arbianto	L	E10051988092018001	III/a (Penata Muda)	Penelaah BMN
41	Anjar Wahyu Putra	L	H18101991092018001	II/a (Pengatur Muda)	Pengemudi
42	Irma Susanti	P	H22061981092018002	II/a (Pengatur Muda)	Pramubakti
43	Nurwanto	L	E05121975062018001	II/a (Pengatur Muda)	Pramubakti

KOORDINATOR					
44	Eko Supartono, SST, M.Si	L	196407011987031001	IV/b (Pembina Tk I)	KBT Pemantauan dan Evaluasi PPISDA/ Analisis Kebijakan Ahli Madya
45	Indah Pratiwi, S.Sos, M.Si	P	198204022008012018	III/d (Penata Tk I)	SKBT Pelaporan dan Evaluasi
46	Nurul Fauzia, S.Kom	P	198103112009122001	III/d (Penata Tk I)	Analisis Kerjasama
47	Nurul Qolbi, S.E., M.Sc.	P	199210312020122003	III/b (Penata Muda Tk. I)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama, CPNS
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA					
1	Savitry Nofianti S, SE, MM	P	197411172009012001	III/c (Penata)	

Tabel 3.2 Rekapitulasi Pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air selama tahun anggaran 2021

Keterangan warna tabel : = PNS + CPNS = Honorer = Konsultan Individual = CLTN

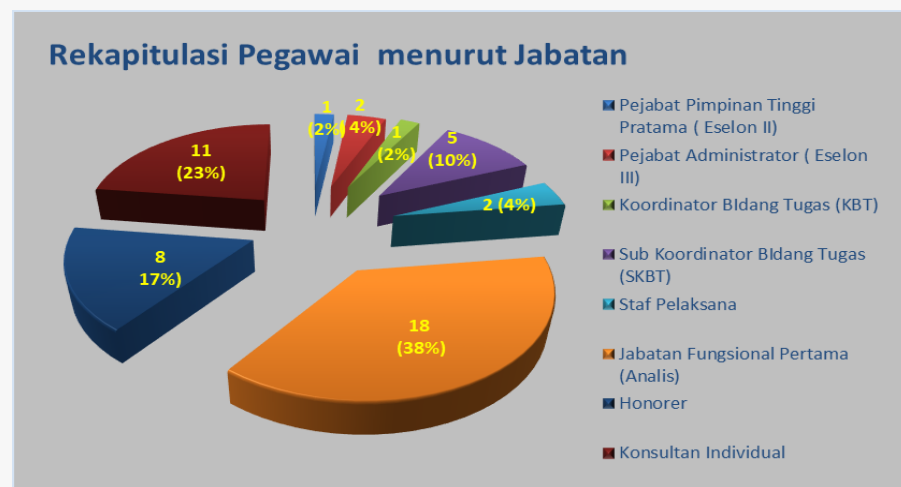
Dari rekapitulasi tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat 2 (dua) Eselon III yaitu Kepala Sub Sudirektorat Legalisasi Rencana Investasi dan Kepala Sub Sudirektorat Koordinasi Kerjasama Investasi. Kemudian, terdapat 1 (satu) Koordinator Bidang Tugas (KBT) Pemantauan dan Evaluasi PPISDA dan 5 Sub Koordinator Bidang Tugas (SKBT) yaitu SKBT Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, SKBT Penyiapan Investasi Sumber Daya Air, SKBT Dukungan dan Penyiapan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air, SKBT Pendampingan dan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air dan SKBT Pelaporan dan Evaluasi PPISDA. Selain itu terdapat 1 (satu) pegawai yang sedang cuti di luar tanggungan negara.

3.1.1 Rekapitulasi Pegawai berdasarkan Jabatan, Jenjang Pendidikan, Golongan, Usia dan Jenis Kelamin

Berikut ini terdapat rekapitulasi pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Rekapitulasi berdasarkan Jabatan		
NO	Jabatan	JUMLAH
1	PNS	29
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)	1
	Pejabat Administrator (Eselon III)	2
	Koordinator Bidang Tugas (KBT)	1
	Sub Koordinator Bidang Tugas (SKBT)	5
	Staf / Pelaksana	2
	Jabatan Fungsional Pertama (Analisis)	18
2	Honorir	8
3	Konsultan Individual	11
TOTAL		47

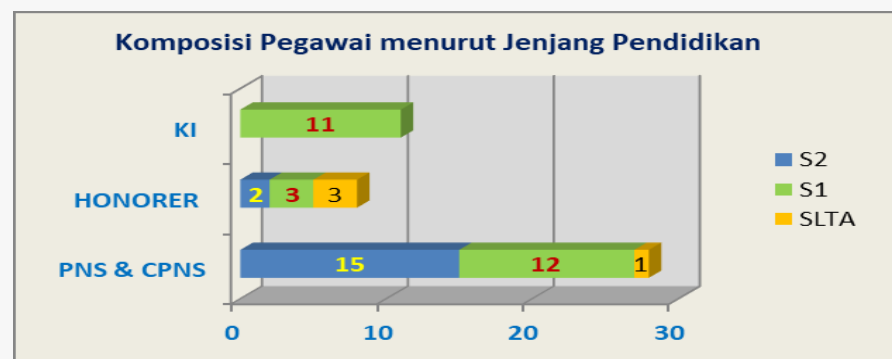
Tabel 3.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 3.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Rekapitulasi berdasarkan Pendidikan				
NO	Jenjang Pendidikan	PNS + CPNS	Honorir	KI
1	S2	15	2	-
2	S1	12	3	11
3	SMA Sederajat	1	3	-
TOTAL		28	8	11

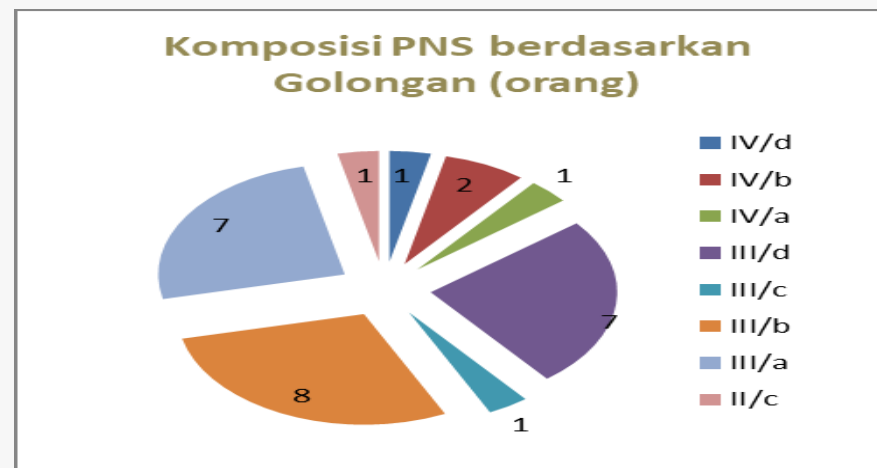
Tabel 3.4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 3.3 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Rekapitulasi berdasarkan Golongan dan Pendidikan					
NO	GOLONGAN	S2	S1	SLTA	JUMLAH
1	IV/d	1	-	-	1
2	IV/b	2	-	-	2
3	IV/a	1	-	-	1
4	III/d	2	5	-	7
5	III/c	1	-	-	1
6	III/b	8	-	-	8
7	III/a	-	7	-	7
8	II/c	-	-	1	1
JUMLAH		15	12	1	28

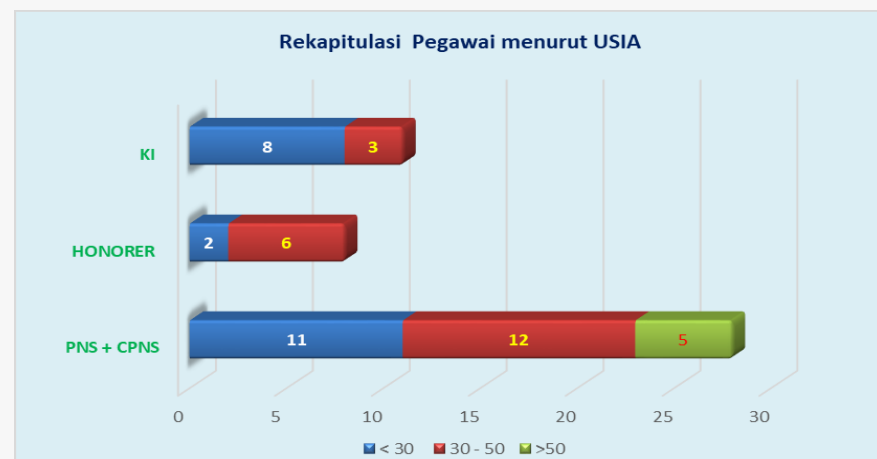
Tabel 3.5 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan pendidikan



Gambar 3.4 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan pendidikan

Rekapitulasi berdasarkan Usia				
NO	Jenis Kelamin	PNS + CPNS	Honorar	KI
1	Laki-laki	15	2	-
2	Perempuan	12	3	11
3	SMA Sederajat	1	3	-
TOTAL		28	8	11

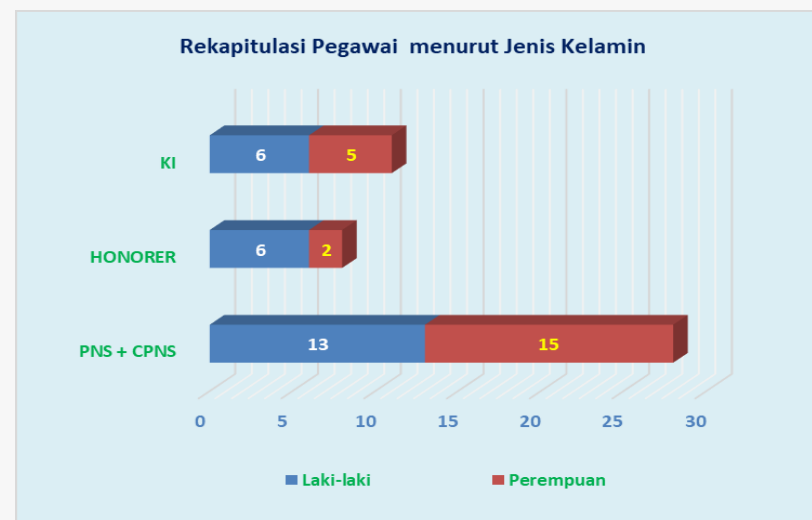
Tabel 3.6 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia



Gambar 3.5 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Usia

Rekapitulasi berdasarkan Jenis Kelamin				
NO	Jenis Kelamin	PNS + CPNS	Honorar	KI
1	Laki-laki	13	6	6
2	Perempuan	15	2	5
TOTAL		27	5	11

Tabel 3.7 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 3.6 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

3.1.1 Analisis Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan data dari bagian tata usaha Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Dit.PPISDA), terdapat beberapa jabatan fungsional di Direktorat PPISDA antara lain Analis Kebijakan Ahli Madya, Analis Kebijakan Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Pranata Humas Ahli Muda, Teknik Pengairan Ahli Pertama, Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama dan Analis Kerjasama.

No	Nama Jabatan Fungsional	Kebutuhan (K)	Bezetting (B)	Formasi (F)	%
1	2	3	4	(5) = (3) – (4)	6
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air					
A.	Koordinator Bidang Tugas Koordinator Bidang Tugas Pemantauan dan Evaluasi				
1	Analis Kebijakan Ahli Madya	1	1	0	0%
2	Pranata Humas Ahli Muda	1	1	0	0%
3	Analis Kebijakan Ahli Pertama	2	1	1	50%
4	Teknik Pengairan Ahli Pertama	2	0	2	100%
5	Pembiayaan Infrastruktur Ahli Pertama	2	0	2	100%
6	Analis Kerjasama	1	1	0	0%
Sub Total		9	4	5	56%
Subdirektorat Legalisasi Rencana Investasi					
A.	Subkoordinator Bidang Tugas Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				
1	Analis Kebijakan Ahli Muda	4	1	3	75%
2	Analis Kebijakan Ahli Pertama	4	4	0	0%
3	Perancang Peraturan Perundangan Ahli Pertama	1	0	1	100%
4	Teknik Pengairan Ahli Muda	1	0	1	100%
5	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1	100%
6	Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda	1	0	1	100%
7	Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	1	0	1	100%
Sub Total		13	5	8	62%

No	Nama Jabatan Fungsional	Kebutuhan (K)	Bezetting (B)	Formasi (F)	%
1	2	3	4	(5) = (3) – (4)	6
B.	Subkoordinator Bidang Tugas Penyiapan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air				
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	1	3	75%
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4	3	1	25%
3	Perancang Peraturan Perundangan Ahli Pertama	1	0	1	100%
4	Teknik Pengairan Ahli Muda	1	0	1	100%
5	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1	100%
6	Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda	1	0	1	100%
7	Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	1	1	0	0%
	Sub Total	13	5	8	62%
Subdirektorat Koordinasi Kerja Sama Investasi					
A.	Subkoordinator Bidang Tugas Dukungan dan Penyiapan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air				
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0	0%
2	Teknik Pengairan Ahli Pertama	2	1	1	50%
3	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2	2	0	0%
4	Analisis Kerjasama	2	0	2	100%
5	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1	0	1	100%
	Sub Total	8	4	4	50%
B.	Subkoordinator Bidang Tugas Pendampingan dan Transaksi Infrastruktur Sumber Daya Air				
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	1	0	0%
2	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	4	4	0	0%
3	Teknik Pengairan Ahli Pertama	1	0	1	100%
4	Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan	1	0	1	100%
5	Analisis Kerjasama	1	0	1	100%
	Sub Total	8	5	3	38%

No	Nama Jabatan Fungsional	Kebutuhan (K)	Bezetting (B)	Formasi (F)	%
1	2	3	4	(5) = (3) – (4)	6
Subbagian Tata Usaha					
1	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	1	100%
2	Pengadministrasian Umum	4	0	4	100%
3	Pengelola Dokumentasi	1	1	0	0%
	Sub Total	6	1	5	83%
GRAND TOTAL		57	24	33	58%

Tabel 3.8. Pemetaan Kebutuhan Pegawai Direktorat PPISDA

Dalam tabel 3.1.8. pemetaan kebutuhan pegawai Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur PPISDA di atas dapat dilihat, jumlah kebutuhan pegawai, jumlah pegawai yang ada saat ini dan formasi pegawai yang masih kosong dari masing-masing bagian dilingkungan Direktorat PPISDA. Jika dilihat dari kebutuhan jafung di tiap bagian, rata-rata kebutuhan pegawai sesuai jafung sebesar 100 %, yang artinya beberapa bagian masih ada yang belum mencukupi kebutuhan pegawai yang sesuai dengan jafung yang dibutuhkan. Namun jika berdasarkan dari total keseluruhan pegawai, kebutuhan pegawai Direktorat PPISDA sebesar 58% dari total kebutuhan pegawai sebesar 57 pegawai.

3.1.2 Peningkatan Kualitas SDM

Pada dasarnya, sumber daya manusia merupakan penunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan apabila mencukupi dari sisi jumlah, kualitas, dan professional dibidangnya, apalagi sumber daya manusia yang dimiliki mempunyai motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, maka pencapaian kinerja akan semakin baik. Sebagai upaya perbaikan untuk pengembangan sumber daya manusia, selama tahun 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah mengikut sertakan

pegawainya untuk mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti selama tahun 2021 oleh pegawai – pegawai di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

NO	JENIS DIKLAT
1	Bimbingan Teknis Tim Penilai Instansi (TPI) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Distance Learning)
2	Bimtek Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Kementerian PUPR
3	Certified Public Private Partnership Professional - Foundation Level Gelombang I
4	Certified Public Private Partnership Professional - Foundation Level Gelombang II
5	Certified Public Private Partnership Professional - Foundation Level Gelombang III
6	<i>Certified Public Private Partnership Professional - Preparation Level Batch II</i>
7	<i>Certified Public Private Partnership Professional - Foundation Level Batch III</i>
8	Diklat Bendahara Pengeluaran
9	Estimasi Biaya Konstruksi
10	<i>Infrastructure Business Case: International</i>
11	Manajemen Risiko Investasi Infrastruktur
12	pekan jabatan fungsional DJPI , mengembangkan karier jafung yang berintegritas dan berkompetensi
13	Pelatihan Bidang Pelaksanaan Anggaran
14	Pelatihan BMN
15	Pelatihan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Pertama
16	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Tahun 2021
17	Pelatihan KPBU
18	Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Angkatan I Di Kementerian PUPR
19	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Sertifikasi PBJ Dasar Juni 2021
20	Pelatihan Perencanaan Anggaran
21	Penyusunan Policy Brief/Policy Paper

22	Perencanaan Infrastruktur Terpadu Berbasis Pengembangan Wilayah
23	<i>Project Development Routemap Training Course</i>
24	Sistem Informasi Pemetaan untuk Perencanaan Infrastruktur
25	Workshop Manajemen Risiko
26	Workshop on Infrastructure Finance - Singapore Cooperation Pragramme
27	Workshop value for money (VfM) dalam pelaksanaan proyek kerjasama pemerintah dengan Dadan Usaha (KPBU),

Tabel 3.9 Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti pegawai Direktorat PPISDA TA. 2021

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi demi tercapainya kinerja sesuai dengan target. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap unit organisasi/kerja. Apabila sarana dan prasana tidak tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka seluruh kegiatan yang dilakukan tidak akan bisa mencapai hasil sesuai yang di harapkan. Berikut ini adalah Sarana dan Prasaran yang tersedia di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Pembiayaan Infrastruktur SDA :

No.	Nama Barang	Identitas Barang		Σ UNIT	Kondisi			Keterangan
		Merk/Type	Thn.Prlh		B	RR	RB	
1	AC SENTRAL-CASSETTE	DAIKIN	2016	5	√			LT. 3 WING 4
2	AC SPLIT	DAIKIN	2016	6	√			LT. 3 WING 4
3	ACCES CONTROL	RS-232-WIRGRAND	2015	1	√			LT. 3 WING 4
4	ACCES POINT	ZONEFLEX R500	2017	1	√			LT. 3 WING 4
5	ALAT PENGHANCUR KERTAS	Secure Maxi 34 CCM	2017	4	√			LT. 3 WING 4
6	CAMERA CONFERENCE	BCC 950	2020	1	√			LT 3 WING 4
7	FUJIFILM	Mikrrorless X-A5	2019	1	√			LT. 3 WING 4
8	EXHAUSE FAN	PANASONIC	2016	3	√			LT. 3 WING 4
9	FILLING CABINET BESI	ALBA	2007	9	√			LT. 3 WING 4
10	FINGER PRINTER	READER MP 4800	2015	1	√			LT. 3 WING 4

No.	Nama Barang	Identitas Barang		Σ UNIT	Kondisi			Keterangan
		Merk/Type	Thn.Prth		B	RR	RB	
11	FOCUSING SCREEN	MICROVISION V 330x330 RL	2018	1	√			Lt. 3 WING 4
12	KURSI BESI/METAL		2021	7	√			LT. 3 WING 4
13	KURSI DIREKTUR DANKHA	D 9005 AL CPT	2017	1	√			LT. 3 WING 4
14	KURSI MANAGER 1	Ortiz I TC	2017	12	√			LT. 3 WING 4
15	KURSI STAFF DANKHA	MATTEA I TC CHR	2019	27	√			Lt. 3 WING 4
16	LASER POINTER	LEXMA CP (MP5)	2015	1	√			LT. 3 WING 4
17	Sony Projector	[VPL-DX140]	2015	1	√			LT. 3 WING 4
18	LDC Projector	Infocus	2018	1	√			LT. 3 WING 4
19	LEMARI BESI/METAL		2020	10	√			LT. 3 WING 4
20	Meja Kerja Kaca	MTP 03	2017	1	√			LT.2 WING 4
21	MEJA MANAGER 1	MKM 160 - 50 COLLIE	2017	12	√			LT. 3 WING 4
22	MEJA KERJA STAF 120	MJS 120 - 70 COLLIE	2017	5	√			DIT. PPISDA
23	Meja Kerja Kayu	120 x 75 x 75	2019	15	√			LT. 3 WING 4
24	MEJA RAPAT	380 x 150 x75	2019	2	√			LT. 3 WING 4
25	SOFA		2021		√			LT. 3 WING 4
26	Credenza 4 Pintu (ENZO)	NAKAS	2018		√			LT. 3 WING 4
27	PC Dell XPS 13	[Core-i3-4010] Ultrabook	2015	2	√			LT. 3 WING 4
28	PC ASUS	Zenbook UX410UQ	2017	2	√			LT. 3 WING 4
29	ASUS	Zenbook UX410UQ	2017	3	√			LT. 3 WING 4
30	LENOVO YOGA	520-14IKB	2018	1	√			Lt. 3 WING 4
31	LENOVO THINK CENTRE	V510Z-1IF	2017	4	√			LT. 3 WING 4
32	LENOVO DESKTOP	IC510-15IKL/ i7-8700	2018	9	√			Lt. 3 WING 4
33	HP	PC ALL IN ONE 27-R074D	2019	1	√			Lt. 3 WING 4
34	HP Pavilion Slimline	450-023 D	2015	8	√			Lt. 3 WING 4
35	Dell XPS One 2720	(core i5-4590s) All-in-one	2015	1	√			Lt. 3 WING 4
36	HP Envy 750-101D	Desktop Mini tower	2016	3	√			Lt. 3 WING 4
37	Dell Optiplex 3040	Core i5-6500 win7 MT	2016	1	√			Lt. 3 WING 4
38	LENOVO	IC510-15ICB i7-9700	2019	2	√			LT. 3 WING 4
39	DELL	DELL INSPIRON AIO 5490	2020	3	√			LT. 3 WING 4
40	LENOVO	IC i5-9400 Processor (9M cache, up to 4.10GHz, 6 cores)	2021	4	√			LT. 3 WING 4
41	Printer HP LaserJet Pro	400 M451 nw [CE956A] Warna	2015	1	√			Lt. 3 WING 4
42	PRINTER HP LaserJet Pro	P1102 [CE651A]	2015	12	√			Lt. 3 WING 4
43	PRINTER EPSON	L 1800	2017	1	√			Lt. 3 WING 4
44	PRINTER HP	JET Pro M254nw	2019	2	√			LT. 3 WING 4
45	PRINTER HP	LASERJET Pro M15w	2019	2	√			LT. 3 WING 4

No.	Nama Barang	Identitas Barang		Σ UNIT	Kondisi			Keterangan
		Merk/Type	Thn.Prh		B	RR	RB	
46	PRINTER EPSON	InkJET L 1800	2019	1	√			LT. 3 WING 4
47	PRINTER EPSON	ECOTANK L 3110 ALL IN ONE Ink	2019	1	√			LT. 3 WING 4
48	BROTHER COLOR	Laser Printer (HL-L8260CDN)	2020	1	√			LT. 3 WING 4
49	RAK SUSUN		2021	1	√			LT. 3 WING 4
50	AVISION	Avision AV176U	2020	2	√			LT. 3 WING 4
51	TABLET P.C	Samsung Galaxy Tab S4	2018	1	√			Lt. 3 WING 4
52	Panasonic LED 32 Inch	LED 32 Inch	2017	1	√			LT. 3 WING 4
53	SAMSUNG LED 40 Inch	LED 40 Inch	2019	1	√			LT. 3 WING 4
54	UNIT REMOTE CONTROL	DJI MAVIC 2 PRO	2019	1	√			LT. 3 WING 4

Tabel 3.10. Daftar Barang Milik Negara (BMN) Direktorat PPISDA TA. 2021

Sarana dan prasarana komputer sebagai alat penunjang hanya diberikan kepada pegawai PNS dan Honorer. Sejak mewabahnya virus covid di manca negara, terutama di Indonesia. Berdasarkan himbauan bapak menteri PUPR, dilingkungan Direktorat jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR dilakukan Pemasangan pembatas dari bahan akrilik di masing-masing meja staf dan ruang rapat untuk mencegah penularan Covid-19.



Gambar 3.7. Ruang Kerja dan Ruang Rapat Direktorat PPISDA

3.3 Daftar Isian Pelaksana Anggaran

Pada awal tahun anggaran 2021, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki anggaran sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua Milyar Rupiah) sesuai DIPA NOMOR : SP DIPA- 033.16.1.631003/2021 tanggal 23 November 2020. Selama tahun anggaran 2021, Direktorat PPISDA mengalami revisi DIPA selama 4 x jika dilihat dari total keseluruhan anggaran, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.21 History Revisi DIPA Direktorat PPISDA selama tahun 2021 berdasarkan Rincian Output.

IKK/KRO/RO			URAIAN		TARGET AWAL		PAGU AWAL (dlm ribuan)		TARGET REVISI 1		PAGU REVISI 1 (dlm ribuan)		TARGET REVISI 2		PAGU REVISI 2 (dlm ribuan)		TARGET REVISI 3		PAGU REVISI 3 (dlm ribuan)		TARGET REVISI 4		PAGU REVISI 4 (dlm ribuan)	
TANGGAL REVISI							23 Nopember 2020				18 Februari 2021				28 JULI 2021				20 agustus 2021				2 nopember 2021	
4197		PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN			17		22,000,000.00		14		14,902,379.00		14		13,833,548.00		14		12,048,405.00		14		11,048,405.00	
IKK	02	TINGKAT PENCAPAIAN PELAKSANAAN PENYIAPAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR																						
KRO 16	4197.ABF	KEBIJAKAN BIDANG PRASARANA DAN PRASARANA			10	Rekomendasi Kebijakan	15,550,000.00		8	Rekomendasi Kebijakan	11,202,379.00		8	Rekomendasi Kebijakan	10,371,864.00		8	Rekomendasi Kebijakan	8,762,749.00		8	Rekomendasi Kebijakan	8,025,289.00	
RO	01	ABF.001	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA		2	Rekomendasi Kebijakan	1,200,000.00		2	Rekomendasi Kebijakan	1,452,379.00		2	Rekomendasi Kebijakan	1,336,516.00		2	Rekomendasi Kebijakan	1,064,103.00		2	Rekomendasi Kebijakan	805,791.00	
	02	ABF.002	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA		2	Rekomendasi Kebijakan	2,100,000.00		1	Rekomendasi Kebijakan	1,500,000.00		1	Rekomendasi Kebijakan	1,473,523.00		1	Rekomendasi Kebijakan	1,488,774.00		1	Rekomendasi Kebijakan	1,488,774.00	
	03	ABF.003	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		5	Rekomendasi Kebijakan	11,550,000.00		4	Rekomendasi Kebijakan	7,550,000.00		4	Rekomendasi Kebijakan	6,889,521.00		4	Rekomendasi Kebijakan	5,481,950.00		4	Rekomendasi Kebijakan	5,002,802.00	
	04.	ABF.004	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		1	Rekomendasi Kebijakan	700,000.00		1	Rekomendasi Kebijakan	700,000.00		1	Rekomendasi Kebijakan	672,304.00		1	Rekomendasi Kebijakan	727,922.00		1	Rekomendasi Kebijakan	727,922.00	
KRO 17	4197.AEE	KEMITRAAN			2	Kesepakatan	4,000,000.00		2	Kesepakatan	1,800,000.00		2	Kesepakatan	1,674,165.00		2	Kesepakatan	1,502,541.00		2	Kesepakatan	1,187,422.00	
RO	01	AEE.001	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan		2	Kesepakatan	4,000,000.00		2	Kesepakatan	1,800,000.00		2	Kesepakatan	1,674,165.00		2	Kesepakatan	1,502,541.00		2	Kesepakatan	1,187,422.00	
KRO 18	4197.AFA	NORMA, STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA			2	NSPK	1,200,000.00		2	NSPK	800,000.00		2	NSPK	744,563.00		2	NSPK	742,049.00		2	NSPK	673,665.00	
RO	01	AFA.001	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA		2	NSPK	1,200,000.00		2	NSPK	800,000.00		2	NSPK	744,563.00		2	NSPK	742,049.00		2	NSPK	673,665.00	
KRO 19	4197.EAL	LAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL			3	Laporan	1,250,000.00		2	Laporan	1,100,000.00		2	Laporan	1,042,956.00		2	Laporan	1,041,066.00		2	Laporan	1,162,029.00	
RO	01	EAL.001	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		2	Laporan	950,000.00		1	Laporan	800,000.00		1	Laporan	767,945.00		1	Laporan	824,409.00		1	Laporan	945,372.00	
	02	EAL.002	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		1	Laporan	300,000.00		1	Laporan	300,000.00		1	Laporan	275,011.00		1	Laporan	216,657.00		1	Laporan	216,657.00	

Tabel 3.11. History Revisi DIPA Direktorat PPISDA selama tahun 2021 berdasarkan Rincian Output

Kode	Kegiatan/Output/Paket DIPA AWAL	DIPA AWAL	Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 1	DIPA REVISI 1	Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 2	DIPA REVISI 2	Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 3	DIPA REVISI 3
		(Rp Ribu)		(Rp Ribu)		(Rp Ribu)		(Rp Ribu)
4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	22,000,000	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,902,379	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,902,379	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	14,902,379
4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	15,550,000	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	11,202,379	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	11,202,379	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	11,202,379
4197.ABF.001.051.A	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPSDA TA. 2022	600,000	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPSDA TA. 2022	1,021,040	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPSDA TA. 2022	1,021,040	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPSDA TA. 2022	1,021,040
4197.ABF.001.052.B	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	600,000	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	431,339	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	431,339	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	431,339
4197.ABF.002.051.A	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021	1,500,000	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021	1,500,000	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021	1,500,000	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021	1,500,000
4197.ABF.002.051.B	Konsultasi Publik Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	600,000	-	-	-	-	-	-
4197.ABF.003.051.A	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,500,000	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	2,000,000	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	2,000,000	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	2,000,000
4197.ABF.003.052.A	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000
4197.ABF.003.052.B	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021	2,500,000	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021	2,500,000	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021	2,500,000	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021	2,500,000
4197.ABF.003.052.C	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021	2,500,000	-	-	-	-	-	-
4197.ABF.003.052.D	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Matenggeng	5,000,000	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri	3,000,000	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri	3,000,000	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri	3,000,000
4197.ABF.004.051.A	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air	700,000	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air	700,000	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air	700,000	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air	700,000
4197.AEE	Kemitraan	4,000,000	Kemitraan	1,800,000	Kemitraan	1,800,000	Kemitraan	1,800,000
4197.AEE.001.051.A	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	1,000,000	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	800,000	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	800,000	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	800,000
4197.AEE.001.052.A	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	2,000,000	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	600,000	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	600,000	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	600,000
4197.AEE.001.052.B	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Penyediaan Air Baku	1,000,000	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Penyediaan Air Baku	400,000	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Penyediaan Air Baku	400,000	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Penyediaan Air Baku	400,000
4197.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,200,000	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	800,000	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	800,000	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	800,000
4197.AFA.001.051.A	Penyusunan Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Berbasis Aplikasi	600,000	Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBU Sektor Sumber Daya Air	500,000	Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBU Sektor Sumber Daya Air	500,000	Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBU Sektor Sumber Daya Air	500,000
4197.AFA.001.051.B	Penyusunan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Sektor Sumber Daya Air	600,000	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	300,000	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	300,000	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	300,000
4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,250,000	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,100,000	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,100,000	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,100,000
4197.EAL.001.051.A	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	500,000	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	800,000	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	800,000	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	800,000
4197.EAL.001.051.B	Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi Teknis Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	450,000	-	-	-	-	-	-
4197.EAL.002.051.A	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	300,000	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	300,000	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	300,000	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	300,000

Tabel 3.12. History Revisi DIPA mulai dari DIPA awal, Revisi DIPA 1, Revisi DIPA 2, Revisi DIPA 3 berdasarkan paket kegiatan

Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 4	DIPA REVISI 4 (Rp Ribu)	Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 5	DIPA REVISI 5 (Rp Ribu)	Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 6	DIPA REVISI 6 (Rp Ribu)
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	13,833,548	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12,048,405	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12,048,405
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	10,371,864	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,762,749	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,762,749
Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2022	941,916	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2022	754,691	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2022	754,691
Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBUSektor Sumber Daya Air	394,600	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBUSektor Sumber Daya Air	309,412	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBUSektor Sumber Daya Air	309,412
Penyusunan Studi Pendahuluan KPBUSektor SDA TA. 2021	1,473,523	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBUSektor SDA TA. 2021	1,488,774	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBUSektor SDA TA. 2021	1,488,774
-	-	-	-	-	-
Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBUSektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,853,537	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBUSektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,501,688	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBUSektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,760,000
Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000
Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBUSektor Bendungan TA. 2021	2,405,936	Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBUSektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,350,214	Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBUSektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,091,902
-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBUSektor Bendungan Bodri	2,580,048	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBUSektor Bendungan Bodri	2,580,048	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBUSektor Bendungan Bodri	2,580,048
Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBUSektor Sumber Daya Air	672,304	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBUSektor Sumber Daya Air	727,922	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBUSektor Sumber Daya Air	727,922
Kemitraan	1,674,165	Kemitraan	1,502,541	Kemitraan	1,502,541
Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBUSektor Infrastruktur Sumber Daya Air	742,493	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBUSektor Infrastruktur Sumber Daya Air	734,134	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBUSektor Infrastruktur Sumber Daya Air	734,134
Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	561,213	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	469,742	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	768,407
Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Penyediaan Air Baku	370,459	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Penyediaan Air Baku	298,665	-	-
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	744,563	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	742,049	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	742,049
Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBUSektor Sumber Daya Air	479,391	Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBUSektor Sumber Daya Air	535,665	Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBUSektor Sumber Daya Air	535,665
Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBUSektor dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	265,172	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBUSektor dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	206,384	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBUSektor dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	206,384
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,042,956	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,041,066	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,041,066
Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	767,945	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	824,409	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	824,409
-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	275,011	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	216,657	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	216,657

Tabel 3.13. History Revisi DIPA mulai dari Revisi DIPA 4, sampai dengan Revisi DIPA 6 berdasarkan paket kegiatan

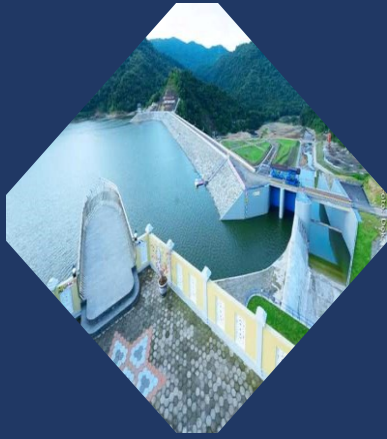
Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 7	DIPA REVISI 7 (Rp Ribu)	Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 8	DIPA REVISI 8 (Rp Ribu)	Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 8, POK REVISI 2	DIPA REVISI 8, POK REVISI 2 (Rp Ribu)	Kegiatan/Output/Paket DIPA REVISI 9	DIPA REVISI 9 (Rp Ribu)
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	12,048,405	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	11,048,405	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	11,048,405	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	11,048,405
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,762,749	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,025,289	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,025,289	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	8,025,289
Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2022	754,691	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2022	496,379	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2022	596,379	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2022	596,379
Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPB Sektor Sumber Daya Air	309,412	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPB Sektor Sumber Daya Air	309,412	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPB Sektor Sumber Daya Air	309,412	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPB Sektor Sumber Daya Air	309,412
Penyusunan Studi Pendahuluan KPB Sektor SDA TA. 2021	1,488,774	Penyusunan Studi Pendahuluan KPB Sektor SDA TA. 2021	1,488,774	Penyusunan Studi Pendahuluan KPB Sektor SDA TA. 2021	1,488,774	Penyusunan Studi Pendahuluan KPB Sektor SDA TA. 2021	1,488,774
-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPB Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,760,000	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPB Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,760,000	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPB Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,760,000	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPB Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,760,000
Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	50,000
Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPB Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	1,091,902	Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPB Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	612,754	Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPB Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	512,754	Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPB Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	512,754
-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPB Bendungan Bodri	2,580,048	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPB Bendungan Bodri	2,580,048	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPB Bendungan Bodri	2,580,048	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPB Bendungan Bodri	2,580,048
Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPB Sektor Sumber Daya Air	727,922	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPB Sektor Sumber Daya Air	727,922	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPB Sektor Sumber Daya Air	727,922	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPB Sektor Sumber Daya Air	727,922
Kemitraan	1,502,541	Kemitraan	1,187,422	Kemitraan	1,187,422	Kemitraan	1,187,422
Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPB Infrastruktur Sumber Daya Air	734,134	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPB Infrastruktur Sumber Daya Air	708,377	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPB Infrastruktur Sumber Daya Air	708,377	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPB Infrastruktur Sumber Daya Air	708,377
Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	768,407	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	479,045	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	479,045	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	479,045
-	-	-	-	-	-	-	-
Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	742,049	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	673,665	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	673,665	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	673,665
Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPB Sektor Sumber Daya Air	535,665	Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPB Sektor Sumber Daya Air	535,665	Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPB Sektor Sumber Daya Air	535,665	Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPB Sektor Sumber Daya Air	535,665
Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPB dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	206,384	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPB dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	138,000	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPB dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	138,000	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPB dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	138,000
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,041,066	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,162,029	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,162,029	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,162,029
Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	824,409	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	945,372	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	945,372	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	945,372
-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	216,657	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	216,657	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	216,657	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	216,657

Tabel 3.14. History Revisi DIPA mulai dari Revisi DIPA 7, sampai dengan Revisi DIPA 9 berdasarkan paket kegiatan

Selama tahun anggaran 2021, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur mengalami 9x revisi DIPA. Revisi DIPA pada Direktorat PPISDA secara total anggaran sebanyak 4x. Selama revisi terdapat perubahan pagu anggaran per paket kegiatan atau pun perubahan nama paket kegiatan. Berikut penjelasan perubahan selama Revisi DIPA sesuai pada tabel-tabel diatas :

REVISI DIPA 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Refocusing dan Realokasi Tahap 1 pada tanggal 18 Februari 2021; b. Pemotongan Sebesar Rp. 7.097.621.000,- c. Pada kegiatan "Konsultasi Publik Sektor Sumber Daya Air TA. 2021" dihapus, untuk pelaksanaan konsultasi publik menggunakan anggaran penyusunan Studi Pendahuluan; d. Pada kegiatan "Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021" dihapus karena Proyek KPBU SPAB Karian Barat dilakukan melalui <i>unsolicited</i>; e. Pada Kegiatan "Penyusunan Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Berbasis Aplikasi" tidak terlalu urgent, sehingga diganti dengan pedoman SLA yang dibutuhkan untuk mekanisme pembayaran AP
REVISI DIPA 2	<ul style="list-style-type: none"> a. Revisi pada tanggal 15 April 2021; b. Pada Revisi ini terjadi percepatan penarikan PHLN, sehingga tidak berkaitan dengan Direktorat PPISDA yang tidak terjadi perubahan apapun;
REVISI DIPA 3	<ul style="list-style-type: none"> a. Refocusing dan Realokasi Tahap 2 pada tanggal 7 Juli 2021; b. Pada Refocusing 2 ini terdapat penambahan gaji dan tunjangan dari Sekjen dan Ditjen Bina Marga hal ini juga tidak ada kaitannya dengan Direktorat PPISDA yang tidak terjadi perubahan baik anggaran maupun paket kegiatan;
REVISI DIPA 4	<ul style="list-style-type: none"> a. Refocusing dan Realokasi Tahap 3 ini pada tanggal 28 Juli 2021; b. Pemotongan anggaran perjalanan dinas dan Percepatan Penarikan PHLN ESP; c. Pemotongan anggaran sebesar Rp.1.068.831.000,-
REVISI DIPA 5	<ul style="list-style-type: none"> a. Refocusing dan Realokasi Tahap 4 ini pada tanggal 20 Agustus 2021; b. Paket kegiatan "Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021" dirubah nama paketnya untuk mengakomodasi proyek KPBU <i>unsolicited</i>; c. Pemotongan anggaran sebesar Rp.1.785.143.000,-
REVISI DIPA 6	<ul style="list-style-type: none"> a. Revisi terjadi ini pada tanggal 6 September 2021; b. Terdapat Ralat Cara Penarikan PHLN ESP, sehingga tidak berkaitan

	dengan Direktorat PPISDA yang tidak terjadi perubahan apapun;
REVISI DIPA 7	<ul style="list-style-type: none"> a. Revisi terjadi ini pada tanggal 20 Agustus 2021; b. Penarikan hal 3 DIPA, tidak berkaitan dengan Direktorat PPISDA sehingga tidak ada perubahan apapun;
REVISI DIPA 8	<ul style="list-style-type: none"> a. Refocusing dan Realokasi ini terjadi pada tanggal 2 Nopember 2021; b. Percepatan Penarikan PHLN NAHP; c. Pergeseran antara KRO,- d. Pemotongan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,-
REVISI DIPA 9,	<ul style="list-style-type: none"> a. Revisi terjadi ini pada tanggal 1 Desember 2021; b. Tidakada perubahan apapun pada Direktorat PPISDA baik secara anggaran maupun nama paket kegiatan.



BAB 4

CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud akuntabilitas kinerja instansi/organisasi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan.

4.1 CAPAIAN KINERJA

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Direktorat PPISDA) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

Target kinerja pada tahun 2021 ini merupakan tahun kedua periode Renstra 2020-2024. Dalam Renstra Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki 1 (satu) Indikator kinerja sasaran program, yaitu: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Indikator kinerja sasaran kegiatan ini mempunyai 8 (delapan) output, yaitu:

- 1). Perencanaan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan
- 2). Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan
- 3). PraStudi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan
- 4). Dukungan KerjaSama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan
- 5). NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan
- 6). Proyek KPBU Perumahan yang SiapDikerjakan
- 7). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
- 8). Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Pencapaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air secara keseluruhan berdasarkan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel Capaian

Perjanjian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	Capaian Kinerja PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	25	24,25

Tabel 4.1. Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya berdasarkan Target Perjanjian Kinerja 2021

Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara target dan capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2021 perOutput berpedoman pada target Renstra tahun 2020 – 2024 dengan di sandingkan dengan DIPA Direktorat PPISDA TA. 2021 dan Revisi DIPA terakhir TA 2021, dilanjutkan dengan cascading capaian kinerja Direktorat PPISDA.

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN			SATUAN	BOBOT	TARGET RENSTRA 2021	TARGET DIPA 2021	TARGET REVISI DIPA 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
SASARAN PRORAM : MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA								
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) : Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif								
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan								
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air								
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR								
Output Kegiatan :								
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA		Rekomendasi Kebijakan		2	2	2	2
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	50%	1	1	1	1
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	50%	1	1	1	1
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan		1	2	1	1
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	100%	1	2	1	1
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan		4	5	4	3
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	40%	1	4	1	1
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	60%	3	1	3	2
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA		Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	100%	1	1	1	1
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan		Kesepakatan		2	2	2	2
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	60%	1	1	1	1
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Kesepakatan	40%	2	2	2	1
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA		NSPK		2	2	2	2
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	100%	2	2	2	2
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA		Laporan		1	2	1	1
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	100%	1	2	1	1
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA		Laporan		1	1	1	1
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	100%	1	1	1	1
TOTAL					14	17	14	13

Tabel 4.2. Capaian Kinerja berdasarkan status DIPA revisi terakhir Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya

Berikut ini tabel Cascading Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2021 adalah sebagai berikut :

Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Baseline 2020 (DJPI)	Target 2021 (DJPI)	KEGIATAN	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	BASELINE 2020 (PPISDA)	TARGET 2021 (PPISDA)	JENIS INDIKATOR	Metode Perhitungan	BOBOT INDIKATOR
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat ketersediaan Investasi / Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	98,93%	100%	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyusunan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	24,56 %	25.00%	Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyusunan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyusunan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target	50.00%
												Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target	50.00%



1

BOBOT INDIKATOR	Kode KRO	KEGIATAN RINCIAN OUPUT	RINCIAN OUPUT	INDIKATOR RINCIAN OUTPUT	TARGET		Bobot RO	Komponen	Bobot Komponen	Paket Output Kegiatan	TARGET	
					VOL	SATUAN					VOL	SATUAN
50.00%	ABF	KEBIJAKAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan	15%	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	50%	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022	1	Rekomendasi Kebijakan
				Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air			Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	50%	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan	
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Rekomendasi Kebijakan	20%	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021	1	Rekomendasi Kebijakan
										Konsultasi Publik KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021		
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4	Rekomendasi Kebijakan	30%	Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	40%	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor SDA TA. 2021	3	Rekomendasi Kebijakan
				Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	60%	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development		Rekomendasi Kebijakan
						Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021	Rekomendasi Kebijakan					
						Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021	Rekomendasi Kebijakan					
						Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Matenggeng	Rekomendasi Kebijakan					
			AFA	NSPK	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	NSPK	15%	Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	Penyusunan Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Berbasis Aplikasi
Penyusunan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Sektor Sumber Daya Air												
50.00%	AEE	KEMITRAAN	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	-	Rekomendasi Kebijakan	35%	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	60%	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA	1	Rekomendasi Kebijakan
				Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2	Kesepakatan		Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	40%	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	1	Kesepakatan
			EAL	LAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Laporan	35%	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1
						Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi Teknis Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air						
	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air			1	Laporan	30%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	100%	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	1	Laporan

2

Paket Output Kegiatan	TARGET		Judul Rekomendasi Kebijakan / Proyek / Dokumen / NSPK / Layanan (Output)	CAPAIAN		Σ Capaian Komponen		Σ Capaian Rincan Output		Σ Capaian Komposit IKK		Σ Capaian Sasaran Kegiatan 2021			
	VOL	SATUAN		VOL	SATUAN	Σ	%	Σ Capaian Komponen	%	Σ	%	Σ	%		
Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022	1	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022	1	Rekomendasi Kebijakan	1	50%	100%	15.00%	94%	47%	97%	24.25%		
Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi kebijakan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan	1	50%								
Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021	1	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi kebijakan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021 serta Dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU SPAB Sindangheula dan Dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU SPAB Kuwil	1	Rekomendasi Kebijakan	1.00	100%	100%	20.0%						
Konsultasi Publik KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021			Konsultasi Publik Sektor Sumber Daya Air TA. 2021" dihapus, untuk pelaksanaan konsultasi publik menggunakan anggaran penyusunan SP		Rekomendasi Kebijakan										
Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor SDA TA. 2021	1	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi kebijakan Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor SDA TA. 2021 serta Dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek KPBU SPAB Kuwil Terintegrasi Dengan SPAM Regional Bimatara	1	Rekomendasi Kebijakan	1	40%	80%	24.00%						
Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development		Rekomendasi Kebijakan	tidak dipakai dan tidak bisa di drop		Rekomendasi Kebijakan	1	40%								
Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021	3	Rekomendasi Kebijakan	Kegiatan ini diganti dengan Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2021 sehingga output adalah Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	2	Rekomendasi Kebijakan										
Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021		Rekomendasi Kebijakan	"Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021" dihapus karena Proyek KPBU SPAB Karian Barat dilakukan melalui unsolicited		Rekomendasi Kebijakan										
Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Matenggeng		Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi kebijakan Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri serta Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri		Rekomendasi Kebijakan										
2	1	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi kebijakan Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air	1	Rekomendasi Kebijakan	1	100%	100%	20.0%						
Penyusunan Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Berbasis Aplikasi	2	NSPK	Kegiatan ini diganti dengan Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBU Sektor Sumber Daya Air sehingga output adalah Pedoman Spesifikasi Keluaran dan Kinerja Pembangunan Bendungan Skema KPBU melalui Ketersediaan Layanan (AP)	1	NSPK	1	50%	100%	15.00%						
Penyusunan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Sektor Sumber Daya Air				Draft SE Dirjen Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited) Dalam Penyediaan Infrastruktur PLTA/M/MH/S		1	1	50%							
Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA	1	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Kebijakan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA	1	Rekomendasi Kebijakan	1	60%	100%	35.00%	100.0%	50%				
Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	1	Kesepakatan	Draft Akhir Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Pemeliharaan Bendungan Bintang Bano Dan Bangun Guna Serah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Bintang Bano	1	Kesepakatan	1	40%								
Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Penyediaan Air Baku	1	Kesepakatan	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021" dihapus karena Proyek KPBU SPAB Karian Barat dilakukan melalui unsolicited	0	Kesepakatan	0	0%								
Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Laporan	Laporan Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Laporan	1	100%	100%	35.00%						
Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi Teknis Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air						Kegiatan ini di hilangkan	0	0%							
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	1	Laporan	Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	1	Laporan	1	100%	100%	30.0%						

Tabel. 4.3 Cascading capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya TA 2021

RINCIAN OUTPUT 1:

Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA (ABF001)

KOMPONEN/INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	1	1	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp 600.000,-	Rp 596.379,-
Komponen 2	Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	1	2.	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor SDA	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp 600.000,-	Rp 309.412,-

Tabel 4.4. Target dan Capaian pada Rincian Output 1 (Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO1.K1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA (4197.ABF.001.051)

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ **Penyusunan Bahan Masukan Program Dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022**

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022 dan menyusun Laporan Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022, dengan sasaran tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA.

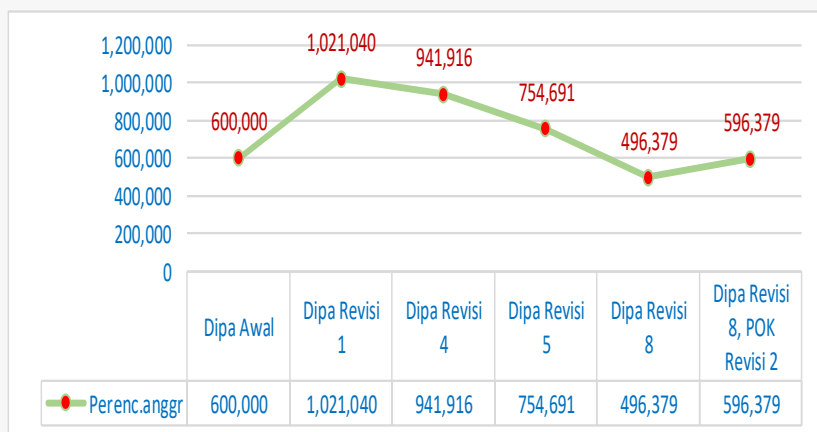
2022 dan Laporan Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air TA. 2022.

Penyusunan rencana kerja dan alokasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan empat *baseline*: (1). Penyusunan rancangan awal rencana kerja berdasarkan kerangka pendanaan jangka menengah (KPJM) yang bersifat indikatif dengan memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya; (2). Berdasarkan pagu indikatif; (3). Berdasarkan pagu anggaran; dan (4). Berdasarkan pagu alokasi anggaran.

Berdasarkan KPJM, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air direncanakan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.000.000.000,- Akan tetapi, setelah Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-361/MK.02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/ 04/2021 tanggal 29 April 2021 hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA. 2022 ditetapkan, Direktorat PPISDA hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.250.000.000,- Setelah Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 dan Menteri Keuangan Nomor S-634/MK.02/2021 tanggal 23 Juli 2021 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2022 ditetapkan, alokasi anggaran Dit. PPISDA tidak berubah sehingga berdasarkan pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran, Dit. PPISDA tetap memiliki anggaran sebesar Rp. 10.250.000.000,-

Pagu Anggaran →

Gambar 4.1. Kronologis Anggaran Komponen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Paket kegiatan Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2022 mengalami lima kali perubahan pagu kegiatan dengan rincian:

- (1) DIPA Revisi 1, terdapat rencana untuk menambah paket penanganan covid-19 pada masing-masing Unit Kerja, akan tetapi paket tersebut tidak jadi dibuat sehingga anggarannya dititipkan pada paket ini;
- (2) DIPA Revisi 4, Sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 3, dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas;
- (3) DIPA Revisi 5, Sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi anggaran tahap 4, dilakukan optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021 dan realokasi anggaran untuk potensi anggaran tidak terserap;
- (4) DIPA Revisi 8, Optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021 dan realokasi anggaran untuk potensi anggaran tidak terserap;
- (5) DIPA Revisi 8, POK Revisi 2, Optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung paket Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPI SDA TA. 2022 yaitu:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	25 Oktober 2021	Rapat Koordinasi Potensi Integrasi Sumber Pendanaan dan Mekanisme Penganggaran KPBU <i>Availability Payment</i> Sektor SDA
b	9-10 Desember 2021	Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2022-2024

Isu yang ada dalam penyusunan kegiatan ini adalah *GAP* anggaran yang cukup besar dari usulan kegiatan pada KPJM dengan pagu indikatif yaitu penurunan sebesar Rp 8.750.000.000. Hal tersebut menyebabkan Dit. PPISDA melakukan penyesuaian paket kegiatan berupa penghapusan maupun pemotongan alokasi anggaran. Pada penyesuaian tersebut salah satu strategi yang dilakukan adalah menghapus paket kontraktual dan menjadikannya paket swakelola. Sehingga anggaran untuk mengkontrak tenaga ahli dapat dihemat karena pada paket kontraktual terdapat aturan alokasi untuk biaya personal bernilai 60% atau lebih dari nilai paket kegiatan.

RO1.K2 PENYUSUNAN IDENTIFIKASI PROYEK KPBU INFRASTRUKTUR SDA (4197.ABF.001.052)

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Penyusunan Profil Dan Identifikasi Proyek Kpbu Sektor Sumber Daya Air

Komponen Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri dari satu sub komponen/paket kegiatan yaitu Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan seleksi proyek Sumber Daya Air yang kemudian dapat dijadikan sebagai proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan, dengan sasaran tersusunnya Identifikasi dan Pipeline Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air sebagai dokumen Penyiapan dan Kerjasama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air.

Sepanjang tahun anggaran 2021, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air mengalami 3 kali pergantian daftar proyek KPBU sektor sumber daya air. Pada awal perencanaan TA. 2021, daftar proyek KPBU sektor SDA terdiri dari 7 bendungan, 4 saluran pembawa air baku (SPAB), 1 daerah irigasi yaitu DI Karangnongko, serta 1 proyek sungai dan pantai yaitu NCICD *stage* B. Bendungan yang termasuk dalam proyek KPBU yaitu Bendungan Merangin, Bendungan Wairoro, Bendungan Pasir Kopo, Bendungan Bodri, Bendungan Matenggeng, Bendungan

Selamayu, dan Bendungan Bintang Bano. Keempat SPAB yang dimaksud adalah SPAB Sidan, SPAB Sindangheula, SPAB Sorong, SPAB Karian Barat.

Perubahan pertama terjadi pada tanggal 24 Maret 2021 berdasarkan Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen. SDA Nomor SA.01-Aj/176 hal Penyampaian Perubahan ke-3 Daftar Proyek Bidang SDA 2020-2024 dengan Kebutuhan Pendanaan Tinggi untuk Pertimbangan Pendanaan KPBU. Terdapat 4 proyek bendungan yang dikeluarkan dari daftar proyek KPBU sektor SDA yaitu Bendungan Wairoro, Bendungan Pasir Kopo, Bendungan Matenggeng, dan Bendungan Selamayu.

Perubahan kedua dilakukan pada tanggal 5 Mei 2021 berdasarkan Surat Direktur SSPSDA nomor PR.02.01-Aj/329 hal Penyampaian Perubahan ke-4 Daftar Proyek Bidang SDA 2020-2024 dengan Kebutuhan Pendanaan Tinggi untuk Pertimbangan Pendanaan KPBU. Terdapat perubahan pada 2 proyek SPAB, dimana SPAB Sorong diganti dengan SPAB Kuwil, serta SPAB Sindangheula diganti dengan SPAB Kedunglanggar.

Pada tanggal 16 Juni 2021, Direktur SSPSDA menyampaikan surat nomor PR.01.02-Aj/459 hal Penyampaian Perubahan ke-5 Daftar Proyek Bidang SDA 2020-2024 dengan Kebutuhan Pendanaan Tinggi untuk Pertimbangan Pendanaan KPBU. Perubahan hanya terjadi pada proyek daerah irigasi, dimana Daerah Irigasi Karangnongko dihapus.

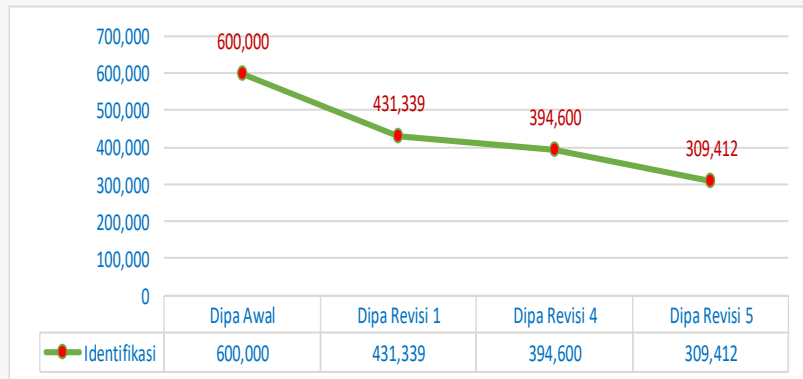
Dinamisasi perubahan proyek KPBU sektor SDA merupakan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ini karena berubahnya proyek akan mempengaruhi *pipeline* proyek KPBU sektor SDA tahun 2020-2024. Perubahan ke-5 daftar proyek KPBU sektor SDA merupakan perubahan yang terjadi di tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 teridentifikasi 3 bendungan, 4 SPAB, dan 1 proyek sungai dan pantai yaitu NCICD *stage* B. Tiga proyek bendungan yang dimaksud yaitu pembangunan Bendungan Bodri, pembangunan Bendungan Matenggeng, serta Pemeliharaan Bendungan dan BOT PLTM Bintang Bano. 4 proyek SPAB yang dimaksud yaitu SPAB

Kuwil terintegrasi SPAM Regional Bimataru, SPAB Sidan dan SPAM Ayung I, SPAB dan SPAM Karian Barat, serta SPAB Kedunglanggar.

Pagu Anggaran →

Gambar 4.2.

**Kronologis Anggaran
Komponen Penyusunan
Identifikasi Proyek KPBU
Infrastruktur Sumber Daya
Air**



Paket kegiatan Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air mengalami tiga kali perubahan anggaran dengan rincian:

- (1) Dipa Revisi 1, Optimalisasi anggaran akibat *refocusing* dan realokasi tahap 1;
- (2) Dipa Revisi 4, Sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 3, dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas
- (3) Dipa Revisi 5, Sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi anggaran tahap 4, dilakukan optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021 dan realokasi anggaran untuk potensi anggaran tidak terserap.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air yaitu:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	3 Februari 2021	Rapat Tindak Lanjut Hasil Outline Business Case (OBC) Bendungan Bodri dan SPAB Karian Barat
b	3-6 Mei 2021	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU daerah irigasi Karang Nongko Jawa Tengah

RINCIAN OUTPUT 2 :

Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA (ABF02)

KOMPONEN / INDIKATOR		Target Rens-tra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal (dlm ribuan)	Pagu Revisi
Komponen 1	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	1 Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp 1.500.000,-	Rp 1.488.774,-
			2.	Konsultasi Publik KPBU Sektor SDA TA.2021	-	Rp 600.000,-	Rp 0,-

Tabel 4.5. Target dan Capaian pada Rincian Output 2 (Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO2.K1. PENYUSUNAN STUDI PENDAHULUAN KPBU INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR (4197.ABF.002.051)

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ **Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA TA. 2021**

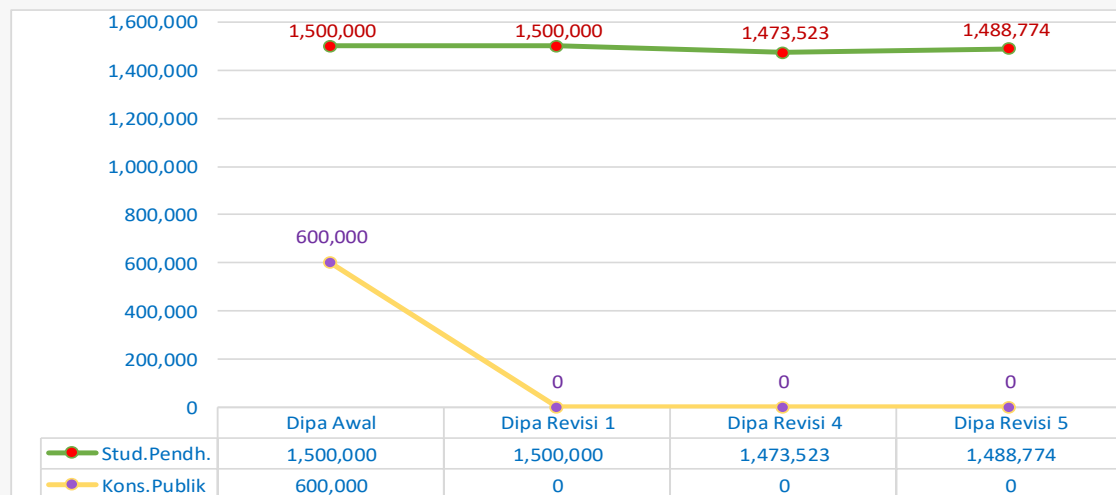
Pada awalnya komponen Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri dari dua sub komponen/paket kegiatan yaitu Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021 dan Konsultasi Publik Sektor Sumber Daya Air TA. 2021. Pelaksanaan konsultasi publik termasuk ke dalam ruang lingkup studi pendahuluan sehingga anggaran untuk pelaksanaan konsultasi publik menggunakan paket penyusunan studi pendahuluan.

Kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021 bertujuan untuk menyusun Studi Pendahuluan yang terdiri dari analisis perlunya penyediaan suatu infrastruktur tertentu, khususnya proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air serta manfaatnya apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana melalui KPBU dan

menyelenggarakan untuk mendiskusikan penjelasan dan penjabaran terkait dengan rencana KPBU, dengan sasaran tersusunnya dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU Sumber Daya Air.

Direktorat PPISDA telah menyusun dokumen Studi Pendahuluan Proyek KPBU SPAB Sindangheula dan Studi Pendahuluan Proyek KPBU SPAB Kuwil.

Pagu Anggaran



Gambar 4.3. Kronologis Anggaran Komponen Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air Berdasarkan Paket Kegiatan

Paket kegiatan Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021 mengalami dua kali perubahan anggaran yaitu pada revisi dipa keempat sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 3, dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas, serta pada revisi dipa kelima untuk melakukan optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Untuk mendukung penyusunan tersebut telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	27 - 29 April 2021	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek SPAB Sindangheula, Banten

b	1-6 Juni 2021	Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Proyek KPBU SPAB Kuwil Sulawesi Utara
c	28 Oktober 2021	Konsultasi Publik dan Real Demand Survey Proyek KPBU SPAB Kuwil Sulawesi Utara
d	1 Desember 2021	Rapat Pembahasan Rancangan Dokumen <i>Request for Qualification</i> (RfQ), Dokumen <i>Request for Proposal</i> (RfP), dan dokumen perjanjian KPBU Bendungan Bodri

⇒ **Konsultasi Publik Kpbu Sektor SDA TA.2021**

Paket kegiatan Konsultasi Publik Sektor Sumber Daya Air TA. 2021 dihapus pada revisi dipa pertama sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi anggaran tahap 1. Pelaksanaan konsultasi publik termasuk ke dalam ruang lingkup studi pendahuluan sehingga anggaran untuk pelaksanaan konsultasi publik menggunakan paket penyusunan studi pendahuluan.

RINCIAN OUTPUT 3 :

Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA(ABF003)

KOMPONEN/ INDIKATOR		Target Rens-tra		Paket Kegiatan	Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi Akhir
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1 Rekomendasi Kebijakan	1	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor SDA TA. 2021	2 Rekomendasi Kebijakan	Rp 1.500.000,-	Rp 1.760.000,-
Komponen 2	Penyusunan Kajian Akhir Studi Kelayakan Pembiayaan SDA	3 Rekomendasi Kebijakan	1.	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	-	Rp 50.000,-	Rp 50.000,-

			2.	Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	1 Rekomen dasi Kebijakan	Rp 2.500.000, -	Rp 512.754,-
			3.	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021	-	Rp 2.500.00,-	Rp 0,-
			4	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri	1 Rekomen dasi Kebijakan	Rp 5.000.000, -	Rp 2.580.048,-

Tabel 4.6. Target dan Capaian pada Rincian Output 3 (Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO3.K1 PENYUSUNAN KAJIAN AWAL PRA STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA (4197.ABF.001.051)

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021

Komponen Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri dari satu sub komponen/paket kegiatan yaitu Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Dokumen *Outline Business Case* dalam rangka penyiapan proyek KPBU sektor sumber daya air, dengan sasaran tersusunnya dokumen *Outline Business Case* untuk sektor sumber daya air.

Direktorat PPISDA telah Menyusun dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan/*Outline Business Case* Proyek KPBU SPAB Kuwil terintegrasi dengan SPAM Regional Bimatara.

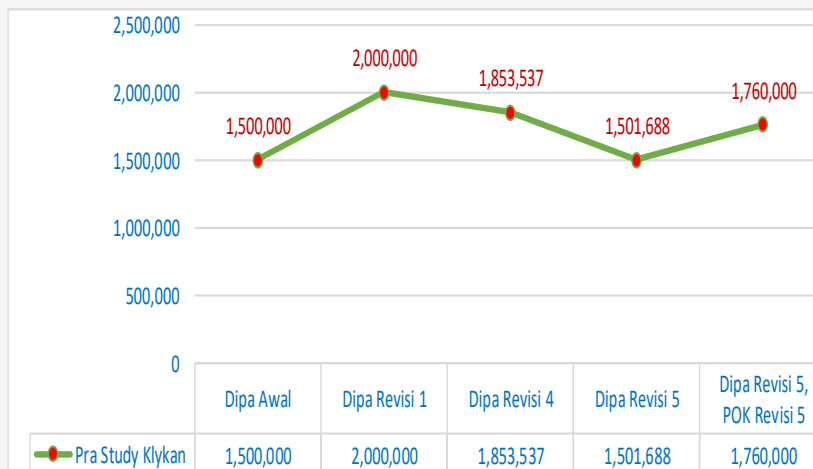


Gambar 4.4 Dokumentasi Rapat Koordinasi dan Kunjungan lapangan Proyek KPBU SPAB Kuwil, Sulawesi Utara

Pagu Anggaran →

Gambar 4.5.

**Kronologis Anggaran
Komponen Penyusunan
Kajian Awal Pra Studi
Kelayakan Pembiayaan
Infrastruktur SDA**



Paket kegiatan Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021 mengalami empat kali perubahan anggaran dengan rincian:

1. Dipa revisi 1, pagu awal yang direncanakan dinilai kurang untuk menghasilkan OBC bendungan yang berkualitas sehingga dilakukan penambahan anggaran;
2. Dipa revisi 4, sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 3, dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas;
3. Dipa revisi 5, optimalisasi anggaran sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi anggaran tahap 4 dan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021;
4. Dipa revisi 5, POK revisi 5, optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung paket kegiatan Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Kpbu Sektor Sumber Daya Air Ta. 2021 adalah sbb :

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	10 Juni 2021	Rapat Persiapan Penyusunan FBC Bendungan Bodri
b	16-18 Juni 2021	Kick Off Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Final Business Case Proyek KPBu Bendungan Bodri Jawa Tengah
c	30 Juli 2021	Rapat Pembahasan Reviu Kajian Ekonomi dan Finansial Proyek KPBu Bendungan Bodri, Jawa Tengah
d	22 Oktober 2021	Rapat Pembahasan Kajian Teknis Penyusunan FBC Proyek KPBu Bendungan Bodri, Jawa Tengah
f	9 November 2021	Rapat Pembahasan Kajian Teknis serta Ekonomi dan Finansial OBC Proyek KPBu SPAB Kuwil Kawangkoan
g	25 November 2021	Penjajakan Minat Pasar (<i>Market Sounding</i>) Proyek KPBu SPAB Kuwil, Sulawesi Utara. Setelah penjajakan minat pasar ini, terdapat tiga perusahaan yang mengirimkan <i>Letter of Intent</i> (LoI) yaitu PT. Brantas Abipraya, PT. Krakatau Tirta Industri, dan PT. Utama Karya.
h	29 November 2021	Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan <i>Outline Business Case</i> (OBC) Proyek KPBu SPAB Kuwil Terintegrasi dengan SPAM Bimatara



Gambar 4.6. Dokumentasi Penjajakan Minat Pasar Proyek KPBu SPAB Kuwil Terintegrasi Dengan SPAM Regional Bimatara, Sulawesi Utara

RO3.K2 JUMLAH PENYUSUNAN KAJIAN AKHIR STUDI KELAYAKAN PEMBIAYAAN SDA (4197.ABF.003.052)

Pada awalnya komponen Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri dari empat sub komponen/paket kegiatan yaitu: (1). Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development; (2). Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021; (3). Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021; dan (4). Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Matenggeng. Tiga dari empat paket kegiatan pada komponen ini mengalami perubahan. Penjelasan dari masing-masing paket yang mendukung dalam Rincian Output 3 komponen 2 adalah sebagai berikut :

⇒ ***Multipurpose Dam-Final Business Case And Bidding Documents Development***

Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development merupakan paket kegiatan untuk mendukung pelaksanaan *loan* ESP ADB Proyek KPBU Bendungan Pasir Kopo. Akan tetapi karena terjadi penolakan dari Bupati, proyek Bendungan Pasir Kopo di-drop dan paket *Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development* tidak digunakan sehingga tidak terdapat penyerapan pada paket ini.

⇒ **Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU *Unsolicited* Sektor Sumber Daya Air TA. 2021**

Paket ini sebelumnya bernama Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021. Kemudian diubah namanya menjadi Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU *Unsolicited* Sektor Sumber Daya Air TA. 2021. Berdasarkan Pipeline Proyek KPBU sektor SDA 2021. Proyek yang memasuki tahap FBC adalah Bendungan Matenggeng dan Bendungan Bodri. Dikarenakan Bendungan Matenggeng dihapus dari daftar proyek KPBU, sehingga penyusunan FBC dilakukan hanya untuk Bendungan Bodri melalui kontraktual. Sehingga tidak ada penyusunan FBC proyek

KPBU yang dilaksanakan melalui swakelola. Oleh karena itu paket kegiatan diubah untuk mengakomodasi proyek-proyek *unsolicited*. Perubahan kebutuhan paket yang sebelumnya dialokasikan untuk penyusunan FBC menjadi penyusunan evaluasi FS proyek KPBU *unsolicited*.

Paket Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2021 bertujuan untuk melakukan penyusunan Evaluasi Kajian Pra-Studi Kelayakan dan/atau Studi Kelayakan atas KPBU *Unsolicited* Sektor Sumber Daya Air yang terdiri dari evaluasi kajian hukum, kajian teknis dan lingkungan, dan kajian ekonomi dan finansial, dengan sasaran terlaksananya evaluasi dokumen Pra-Studi Kelayakan dan/atau Studi Kelayakan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket ini sebagai berikut:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	22 Maret 2021	Rapat Integrasi SPAB dan SPAM Karian Barat
b	5-7 April 2021	Rapat koordinasi tindak lanjut integrasi proyek KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat
c	9 September 2021	Kunjungan dalam rangka Rapat Koordinasi terkait proyek SPAB dan SPAM Ayung I

⇒ **Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021**

Paket Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Saluran Pembawa Air Baku TA. 2021 dihapus. Sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 1, paket ini dihapus juga dikarenakan Proyek KPBU SPAB Karian Barat yang sebelumnya merupakan proyek *solicited* dan berada pada tahap penyusunan FBC diubah menjadi proyek *unsolicited* sehingga tidak dibutuhkan lagi anggaran terkait penyusunan FBC SPAB.

⇒ **Penyusunan Dokumen *Final Business Case* (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri**

Paket Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Matenggeng berubah nomenklatur menjadi Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri. Bendungan Matenggeng didrop berdasarkan Surat Direktur SSPSDA No. SA.01-Aj/176 tanggal 24 Maret 2021 perihal Penyampaian Perubahan ke-3 Daftar Proyek Bidang SDA 2020-2024 dengan Kebutuhan Pendanaan Tinggi untuk Pertimbangan Pendanaan KPBU. Sehingga Bendungan Matenggeng digantikan dengan Bendungan Bodri untuk penyusunan FBC melalui paket kontraktual. Anggaran ideal untuk penyusunan FBC adalah Rp 5 Miliar, akan tetapi karena keterbatasan anggaran akibat *refocusing* dan realokasi yang terjadi sepanjang tahun, anggaran akhir paket ini menjadi Rp. 2.580.048.000.

Paket Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri telah menghasilkan dokumen Kajian Akhir Prastudi Kelayakan/*Final Business Case* (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Untuk mendukung paket kegiatan tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	16-18 September 2021	<i>Real Demand Survey</i> (RDS) Dalam Rangka Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri
b	8 Oktober 2021	Rapat Koordinasi dan Penyepakatan Berita Acara Hasil RDS Dalam Rangka Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri
c	18 November 2021	<i>Market Consultation</i> Proyek KPBU Bendungan Bodri. Setelah pelaksanaan <i>market consultation</i> ini terdapat 3 perusahaan yang mengirimkan <i>Letter of Intent</i> (LoI) yaitu PT. Utama Karya, Lotte Engineering & Construction, dan China Civil Engineering Construction.



Gambar 4.7. Dokumentasi Market Consultation Proyek KPBU Bendungan Bodri, Jawa Tengah

Pagu Anggaran ➔ Berikut ini merupakan kronologis perubahan pagu anggaran yang terdapat pada komponen Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Berdasarkan Paket Kegiatan. (lihat gambar 4.8)

Paket kegiatan ABF.003.052.B Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021 mengalami perubahan nomenklatur menjadi Penyusunan Evaluasi Kajian Studi Kelayakan KPBU Unsolicited Sektor Sumber Daya Air TA. 2021. Berdasarkan Pipeline Proyek KPBU sektor SDA 2021 pada revisi dipa kelima. Paket ini mengalami lima kali perubahan anggaran dengan rincian:

1. Dipa revisi 4, sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 3, dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas
2. Dipa revisi 5, Perubahan kebutuhan paket yang sebelumnya dialokasikan untuk penyusunan FBC menjadi penyusunan evaluasi FS proyek KPBU *unsolicited*.
3. Dipa revisi 5, POK revisi 5, Optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021 dan realokasi anggaran untuk potensi anggaran tidak terserap
4. Dipa revisi 8, Optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021 dan realokasi anggaran untuk potensi anggaran tidak terserap.

5. Dipa revisi 8, POK revisi 2, Optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021 dan realokasi anggaran untuk potensi anggaran tidak terserap



Gambar 4.8. Kronologis Anggaran Komponen Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Berdasarkan Paket Kegiatan

Paket kegiatan ABF.003.052.D Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Matenggeng mengalami perubahan nomenklatur pada revisi dipa pertama sehingga menjadi Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri. Paket ini mengalami dua kali perubahan anggaran yaitu pada

revisi dipa pertama sehubungan dengan keterbatasan anggaran akibat *refocusing* dan realokasi tahap 1, jumlah tenaga ahli dan durasi kontrak disesuaikan agar dapat menyesuaikan dengan anggaran yang didapatkan, serta pada revisi dipa keempat sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 3, dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas.

RINCIAN OUTPUT 4 :

Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA (ABF004)

KOMPONEN /INDIKATOR		Target Rens-tra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	1 Rekomendasi Kebijakan	1.	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor SDA	1 Rekomendasi Kebijakan	Rp 700.000,-	Rp 727.922,-

Tabel 4.7. Target dan Capaian pada Rincian Output 4 (Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO4.K1 DUKUNGAN KERJASAMA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA (4197.ABF.004.051)

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ **Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kpbu Sektor SDA**

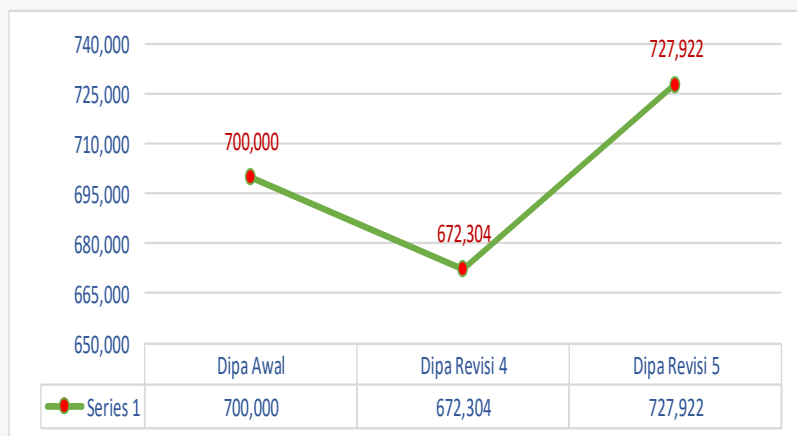
Komponen Penyiapan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri dari satu sub komponen/paket kegiatan yaitu Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kompilasi data dan informasi terkait pengusahaan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan KPBU sektor sumber daya air,

serta menganalisis data dan informasi tersebut sehingga menghasilkan dokumen pelaksanaan penyiapan pengusahaan dukungan pemerintah, dengan sasaran tersusunnya dokumen pelaksanaan penyiapan pengusahaan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan KPBU sektor Sumber Daya Air.

Dalam rangka penyiapan dukungan kerja sama investasi infrastruktur sumber daya air, telah dihasilkan beberapa dokumen seperti formulir *screening form* untuk proses penjaminan pemerintah, Kesepakatan Induk tentang penyediaan fasilitas penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi, serta permohonan konfirmasi pendahuluan proyek KPBU dengan skema pembayaran AP.

Pagu Anggaran →

Gambar 4.9.
Kronologis Anggaran
Komponen Penyiapan
Dukungan Kerja Sama
Investasi Infrastruktur
Sumber Daya Air



Paket kegiatan Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air mengalami dua kali perubahan anggaran yaitu pada revisi dipa keempat, sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 3, dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas, serta pada revisi dipa kelima yang dilakukan dalam rangka optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air yaitu:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	8-10 April 2021	Rapat Pembahasan Screening Form Penjaminan Proyek KPBU Bendungan Merangin, Provinsi Jambi
b	12 November 2021	Rapat Pembahasan Screening Form Penjaminan Proyek KPBU Sub Sektor Bendungan

RINCIAN OUTPUT 5 :

Proyek KPBU SDA yang siap di kerjasamakan (AEE001)

KOMPONEN /INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi
						(dlm ribuan)	
Kompo nen 1	Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Dokume n	1.	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air	1 Dokumen	Rp 1.000.000, -	Rp 708.377,-
Kompo nen 2	Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2 Kesepaka tan	2	Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Draft Kesepakat an	Rp 2.000.000, -	Rp 479.045,-
			3.	Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Dalam	-	Rp 1.000.000, -	-

				Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air Baku			
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.8. Target dan Capaian pada Rincian Output 5 (Proyek KPBU SDA yang siap di kerjasamakan)

RO5.K1 PELAKSANAAN DUKUNGAN DAN PENYIAPAN TRANSAKSI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi penyiapan pelaksanaan transaksi KPBU sektor bendungan sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku. Sasaran dari paket kegiatan ini adalah berlangsungnya pelaksanaan penyiapan transaksi infrastuktur sumber daya air yang sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. Tahapan transaksi KPBU terdiri atas kegiatan Konsultasi Pasar (Market Consultation), Penetapan Lokasi KPBU, Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, Penandatanganan Perjanjian KPBU, Pemenuhan Pembiayaan Penyediaan Infrastuktur (Finansial Close) oleh Badan Usaha Tahapan transaksi diawali dengan mereview kelengkapan dokumen kajian akhir prastudi Kelayakan (Final Bussiness Case/FBC), yang telah dilaksanakan dalam tahapan penyiapan KPBU.

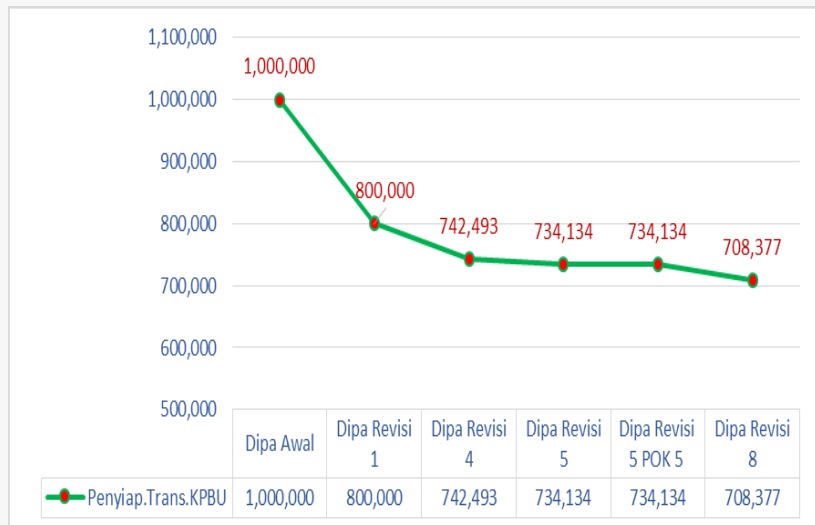
Kegiatan yang dilakukan yakni memastikan bahwa dokumen FBC telah selesai dan dievaluasi oleh PJPK dan tim KPBU. Hal ini ditandai dengan adanya surat pernyataan dari PJPK bahwa proyek KPBU sudah layak secara teknis, ekonomi dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahapan penyiapan, sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU pada tahapan transaksi.

Kesimpulan yang didapatkan dari kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Bidang Sumber Daya Air adalah;

- a. Pada tahun 2021, proyek Bendungan Merangin masih dalam proses penyiapan transaksi, dimana telah ditandatangani surat Konfirmasi pendahuluan AP proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan SPAM pada tanggal 13 Agustus dengan No: S-163/PR.6/2021, dan penyiapan kajian akhir prastudi kelayakan (FBC), transaksi dan penetapan lokasi akan dilaksanakan pada tahun 2022;
- b. Pada bulan Desember 2021, penyelesaian penyusunan FBC Bendungan Bodri akan ditargetkan akan selesai dan akan memasuki tahapan transaksi;
- c. Pada tahun 2022, pemeliharaan bendungan dan BOT PLTM Bintang Bano diperkirakan akan memasuki tahapan lelang.

Pagu Anggaran →

Gambar 4.10.
Kronologis Anggaran
Komponen Pelaksanaan
dukungan dan Penyiapan
Transaksi Pembiayaan
Infrastruktur SDA



Pada paket Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada tahun 2021 terdapat pagu anggaran sebesar Rp708,38 Juta yaitu 98,00% untuk realisasi keuangan sebesar 98,67% dan 99% untuk realisasi fisik (status per tanggal 16 desember pukul 8.00 WIB). Capaian realisasi keuangan maupun realisasi fisik tersebut tidak sesuai dengan target rencana yaitu 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya refocusing anggaran (dimana terjadi refocusing anggaran dari 1.000 Juta menjadi 708,38 Juta), penyesuaian daftar proyek (telah dilakukan perubahan daftar proyek bidang SDA 2020-2024 melalui skema KPBU sebanyak 4x)

dan proyek KPBU Infrastruktur SDA secara umum yang masih dalam tahapan penyiapan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan :

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur SDA yakni:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	26 Maret 2021	Sharing Session Pengelolaan Data Room Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) – Dit. PPIP via Video Conference.
b	30 Maret 2021	Sharing Session Pengelolaan Data Room Proyek KPBU – Dit. PPIJJ via Video Conference.
c	10 Maret 2021	Rapat Persiapan Rancangan Proyek Perubahan Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur SDA dengan Skema KPBU Melalui Penyediaan Sistem Informasi Terintegrasi Sektor SDA di Ruang Rapat 1 Lt. 2 Wing 3 DJPI dan Video Conference.
d	19 Mei 2021	Rapat Tim Efektif : Konten Buku Saku Dan Website via Video Conference.
e	7 - 9 Juni 2021	Bimbingan Teknis Penyiapan Pelaksanaan Tahapan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera dan Video Conference.
f	22 Juni 2021	Rapat Pembahasan Progress Konsep Buku Saku dalam Penyusunan Strategi Percepatan KPBU Sektor Sumber Daya Air di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang, Banten dan Video Conference.
g	25 Juni 2021	Rapat Pembahasan Progress Finalisasi Konsep Buku Saku Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air via Video Conference

Rekomendasi dan beberapa isu yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

1. Proyek KPBU Bendungan Merangin

- a. Dit. PDPPI, Kementerian Keuangan menunggu konfirmasi komitmen AP dari Ditjen SDA sebesar Rp. 350 M/tahun
- b. DJPI sedang dalam proses koordinasi progress dengan Ditjen. SDA terkait dengan UU SDA No. 17/2019

2. Bendungan Bodri

Direktorat PPISDA akan berkoordinasi dengan LMAN dengan KPPIP terkait pengadaan tanah proyek KPBU Bendungan Bodri.

3. Pemeliharaan Bendungan dan BOT PLTM Bintang Bano

DJPI dan Ditjen SDA akan berkoordinasi dengan Ditjen, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dan Kementerian ESDM.



Gambar. 4.11. Dokumentasi Rapat Persiapan Rancangan Proyek Perubahan Strategi Percepatan Penyediaan Infrastruktur SDA dengan Skema KPBU melalui Penyediaan Sistem Terintegrasi Sektor SDA

RO5.K2. Pelaksanaan Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pencapaian kinerja pada indikator 2 ini didukung oleh 2 paket kegiatan yaitu Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air dan Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air Baku. Pada pertengahan tahun terjadi penghapusan paket kegiatan Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air Baku dikarenakan adanya perubahan lingkup proyek yang semula hanya infrastruktur penyediaan air baku (SPAB) menjadi terintegrasi dengan

infrastruktur penyediaan air minum (SPAM). Oleh karena itu, status proyek SPAB yang semula proyek solicited dengan PJPK Menteri PUPR berubah menjadi proyek unsolicited SPAM dengan PJPK Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pada Rincian Ouput 5 ini , tepatnya di indikator 2, hanya didukung oleh satu paket kegiatan saja yaitu Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air.

⇒ **PENYIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN BADAN USAHA KPBU INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk fasilitasi pelaksanaan transaksi tahapan pengadaan Badan Usaha sampai dengan tahap penandatanganan perjanjian KPBU sektor bendungan sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku. Sasaran dari paket kegiatan ini adalah berlangsungnya pelaksanaan transaksi dan pendampingan kerja sama pembiayaan infrastruktur bendungan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan dalam indikator Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Bendungan adalah kesepakatan. Kriteria tercapainya kesepakatan pada indikator tersebut adalah terdapat proyek KPBU yang telah memasuki tahap transaksi atau minimal dokumen FBC telah final.

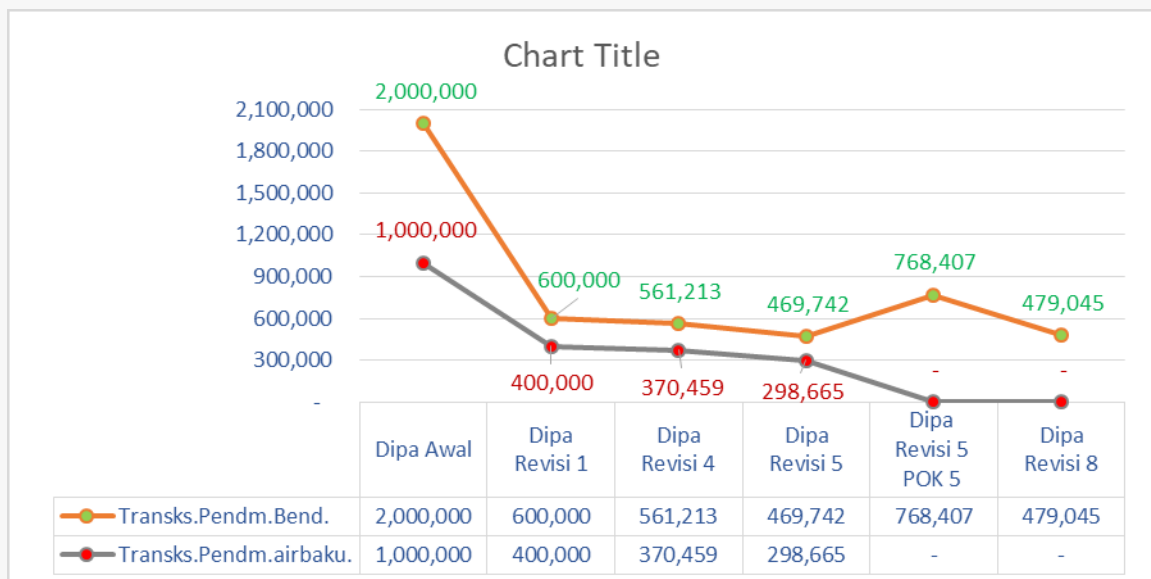
Salah satu proyek KPBU sektor sumber daya air yang ditargetkan memasuki tahap transaksi di tahun 2021 adalah Bendungan Merangin yang terletak di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Namun hingga akhir 2021 Bendungan Merangin belum mencapai tahap transaksi, karena Permohonan Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi pada Proyek KPBU Bendungan Merangin (Project Development Facility – PDF) baru disetujui oleh Kementerian Keuangan di Q4 tahun 2021. Hal tersebut menyebabkan fasilitasi penyiapan proyek berupa penyiapan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan (Final Business Case/PDF) dan fasilitas pendampingan transaksi baru dapat dilaksanakan awal tahun 2022. Oleh karena itu, pada tahun 2021 kegiatan difokuskan untuk dukungan penyiapan pengadaan.

Proyek KPBU bendungan lain yang sedang disusun oleh Direktorat PPISDA adalah Bendungan Bodri di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Proyek ini dilaksanakan dengan skema solicited dan telah melakukan finalisasi FBC di Desember 2021.

Proyek selanjutnya adalah Pemeliharaan Bendungan dan BOT PLTM Bintang Bano di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proyek PLTM Bintang Bano menggunakan skema unsolicited atas prakarsa PT Brantas Abipraya. Status PLTM Bintang Bano saat ini sedang dilakukan inisiasi studi interkoneksi PLTM dalam rangka penetapan tarif listrik di awal sebelum lelang KPBU, sehingga tahap transaksi tidak sesuai dari jadwal awal Q4 tahun 2021. Pada proyek ini capaian kinerjanya dalam tahap draft perjanjian kerjasama.

Selama tahun 2021, terdapat perubahan pada pagu dalam paket kegiatan ini. Hal tersebut disebabkan karena pandemi yang masih berlangsung sehingga beberapa kegiatan rapat masih harus dilaksanakan secara daring. Selain itu, karena tidak ada proyek yang memasuki tahap transaksi, rapat yang dilaksanakan terkait persiapan pengadaan hanya mengundang peserta dalam jumlah kecil sehingga anggaran dipotong untuk efisiensi.

Pagu Anggaran



Gambar 4.12. Kronologis Anggaran Komponen Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Pada Komponen ini terdapat 2 Paket kegiatan yang masing-masing mengalami lima kali perubahan anggaran dengan rincian:

1. DIPA revisi 1, pada 2 paket kegiatan tersebut mengalami perubahan sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 1;
2. DIPA revisi 4, Refocusing dan Realokasi Tahap 3 (Pemotongan anggaran perjalanan dinas) dan Percepatan Penarikan PHLN ESP;
3. DIPA revisi 5, Refocusing dan Realokasi Tahap 4;
4. DIPA revisi 5, POK revisi 5, Penggabungan anggaran pada paket kegiatan Penyusunan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air Baku ke paket kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air. Sehingga otomatis paket kegiatan air baku

Kegiatan yang telah dilaksanakan

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada paket Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan yaitu:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	4 Februari 2021	Rapat Tindak Lanjut Hasil <i>Outline Business Case</i> (OBC) Bendungan Matenggeng via teleconference
b	11 Februari 2021	Rapat Pembahasan Perizinan Bendungan via teleconference.
c	21-22 Juni 2021	Bimbingan Teknis Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air Melalui Skema KPBU Hotel Atria Gading Serpong, Banten dan via teleconference.
d	1 Oktober 2021	Rapat Riviur Rancangan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU <i>Unsolicited</i> Pemeliharaan Bendungan dan Bangun Guna Serah PLTM Bintang Bano Hotel Royal Padjajaran, Bogor dan via teleconference.

e	4 Oktober 2021	Rapat Rivi Rancangan Dokumen Perjanjian Kerja Sama Proyek KPB <i>Unsolicited</i> Pemeliharaan Bendungan dan Bangun Guna Serah PLTM Bintang Bano Hotel Royal Padjajaran, Bogor dan via teleconference.
f	19 November 2021	Rapat Pembahasan Usulan Prakarsa Proyek PLTA Tigadihaji 40 MW, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan dari PT Brantas Abipraya (Persero) di Ruang Rapat 1 Lantai 2 DJPI, Jakarta dan via teleconference.
g	26 November 2021	Rapat Pembahasan Aspek Legal Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Bodri, Ruang Rapat Direktorat PPISDA, Jakarta dan via teleconference.

Rekomendasi dan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

Isu utama dalam capaian kinerja paket kegiatan ini adalah belum adanya proyek KPB bendungan yang telah memasuki tahap transaksi final, karena Bendungan Merangin baru akan melaksanakan FBC di tahun 2022, Bendungan Bodri finalisasi FBC Desember 2021, dan Pemeliharaan Bendungan dan BOT PLTM Bintang Bano di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih perlu dilakukan studi interkoneksi. Berdasarkan hal tersebut, capaian kinerja paket kegiatan ini sudah tercapai sampai tahap draft kesepakatan dan akan di lanjutkan dengan rapat persiapan pengadaan lelang untuk transaksi di tahun 2022.



Gambar. 4.13. Dokumentasi Rapat Rivi Rancangan Dokumen Perjanjian Kerja Sama Proyek KPB *Unsolicited* Pemeliharaan Bendungan dan Bangun Guna Serah PLTM Bintang Bano

RINCIAN OUTPUT 6 :

NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA (AFA001)

KOMPONEN / INDIKATOR		Target Rens-tra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	2 NSPK	1.	Penyusunan Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Berbasis Aplikasi	1 NSPK	Rp 600.000,-	Rp 535.665,-
			2.	Penyusunan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Sektor Sumber Daya Air	1 NSPK	Rp 600.000,-	Rp 138.000,-

Tabel 4.9. Target dan Capaian pada Rincian Output 6 (NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO6.K1 PERUMUSAN NSPK PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SDA

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ **Penyusunan Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Berbasis Aplikasi Analisa Keberhasilan Dan Permasalahan / Penyusunan Pedoman *Service Level Agreement* KPBU Sektor Sumber Daya Air**

Komponen Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air terdiri dari dua sub komponen/paket kegiatan yaitu Penyusunan Pedoman *Service Level Agreement* KPBU Sektor Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi, dan Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.

Pada awalnya paket kegiatan ABF.001.051.A memiliki nama Penyusunan Kriteria Usulan Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air Berbasis Aplikasi namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBU Sektor Sumber Daya Air. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada revisi pertama karena penyusunan pedoman SLA KPBU sektor SDA lebih dibutuhkan dalam penyiapan KPBU sektor SDA, khususnya dalam penyusunan kajian akhir prastudi kelayakan/*final business case* (FBC).

Kegiatan Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBU Sektor Sumber Daya Air bertujuan untuk menyusun kompilasi data dan informasi terkait *Service Level Agreement* KPBU Sektor Sumber Daya Air, serta menganalisis data dan informasi tersebut sehingga menghasilkan pedoman *Service Level Agreement* KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air untuk pembayaran ketersediaan layanan proyek KPBU bidang sumber daya air, dengan sasaran tersusunnya pedoman *Service Level Agreement* KPBU bidang sumber daya air.

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah menyusun Pedoman *Service Level Agreement* (SLA) Proyek KPBU Sumber Daya Air Sub Sektor Bendungan dalam rangka mendukung pelaksanaan KPBU *Availability Payment* Sektor Sumber Daya Air dengan berkoordinasi dengan *stakeholders* terkait, seperti Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, PT. Pembangkitan Jawa Bali, PT. Vale Persero, PT. Indonesia Power, dan ULP PLTA Bili-Bili.

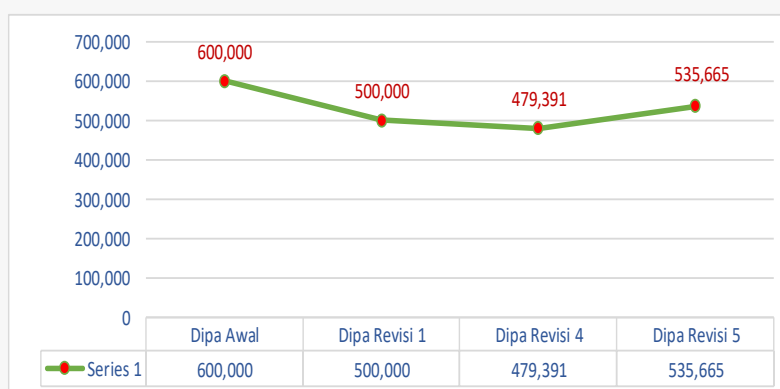
Kegiatan yang telah dilaksanakan :

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	28 Mei 2021	Rapat Pembahasan Konsep Indikator Kinerja KPBU-AP Infrastruktur Bidang SDA Bendungan Lesson Learned KPBU Preservasi Jalintim Sumatera
b	29 September 2021	FGD Indikator Kinerja Layanan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air Studi Kasus Bendungan Bili-bili

c	15 November 2021	Pembahasan Draft Service Level Agreement Proyek KPBu Bendungan Bodri
d	22 November 2021	Rapat Pembahasan dan Survei Lapangan Indikator Kinerja Layanan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Bendungan)
e	6 Desember 2021	Rapat Pembahasan Finalisasi Pedoman Service Level Agreement KPBu Infrastruktur SDA Sub Sektor Bendungan

Pagu Anggaran →

Gambar 4.14.
Kronologis Anggaran
Paket kegiatan
Penyusunan Kriteria
Usulan Proyek KPBu
Sektor Sumber Daya Air
Berdasarkan Aplikasi



Paket kegiatan Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBu Sektor Sumber Daya Air mengalami tiga kali perubahan anggaran dengan rincian:

1. Dipa revisi 1, optimalisasi anggaran akibat *refocusing* dan realokasi tahap 1
2. Dipa revisi 4, sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 3, dilakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas
3. Dipa revisi 5, optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021

⇒ **Penyusunan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBu Sektor Sumber Daya Air**

Ruang lingkup substansi kegiatan Penyusunan Standar dan Pedoman Pengadaan KPBu Bidang Sumber Daya Air meliputi skema KPBu infrastruktur SDA yang terkait dengan tahapan pengadaan dan rencana pengadaan beserta dokumen yang harus disiapkan; Hasil pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan standar dan pedoman

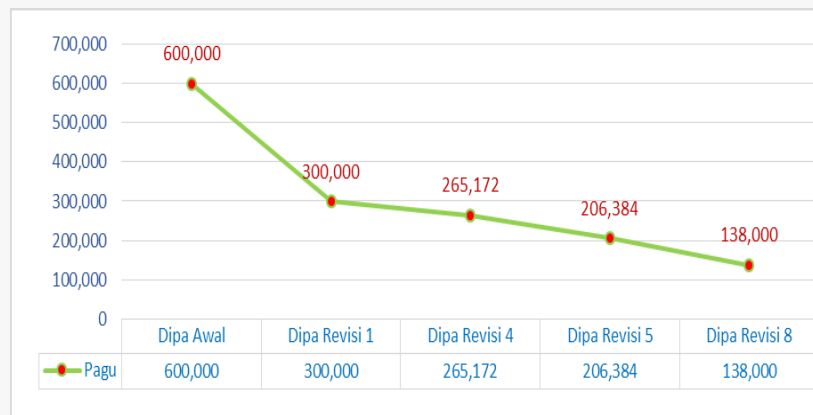
dokumen pengadaan KPBU bidang SDA; Pembuatan Standar dan pedoman dokumen pengadaan untuk membantu proses pengadaan KPBU bidang SDA.

Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	10 November 2021	<i>Benchmarking</i> Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dengan Kementerian Perhubungan Ruang Rapat Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan, Jakarta.
b	6 Desember 2021	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air untuk PLTA dan PLTS Gedung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Jakarta.

Pagu Anggaran ➔

Gambar 4.15
Kronologis Anggaran
Paket kegiatan
Penyusunan Pedoman
Dokumen Pengadaan
KPBU Sektor Sumber
Daya Air



Paket kegiatan Paket kegiatan Penyusunan Pedoman Dokumen Pengadaan KPBU Sektor Sumber Daya Air mengalami empat kali perubahan anggaran dengan rincian:

1. Dipa revisi 1, optimalisasi anggaran akibat *refocusing* dan realokasi tahap 1, dan perubahan judul paket kegiatan menjadi Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air
2. Dipa revisi 4, sehubungan dengan *refocusing* dan realokasi tahap 3 (Pemotongan anggaran perjalanan dinas) dan Percepatan Penarikan PHLN ESP
3. Dipa revisi 5, optimalisasi anggaran berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun untuk TA. 2021

4. Dipa Revisi 8, optimalisasi anggaran, pergeseran antar KRO

RINCIAN OUTPUT 7 :

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA(EAL001)

KOMPONEN / INDIKATOR		Target Renstra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Laporan	1.	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Laporan	Rp 500.000,-	Rp 945.375,-
			2.	Pelaksanaan Pendampingan dan Konsultasi Teknis Pelaksanaan Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air		Rp 600.000,-	-

Tabel 4.10. Target dan Capaian pada Rincian Output 7 (Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA)

RO7.K1 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ PEMANTAUAN PELAKSANAAN INVESTASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Paket kegiatan swakelola ini di adakan dengan maksud untuk menyusun dokumen pemantauan pelaksanaan investasi pembiayaan Infrastruktur Sumber daya air dalam

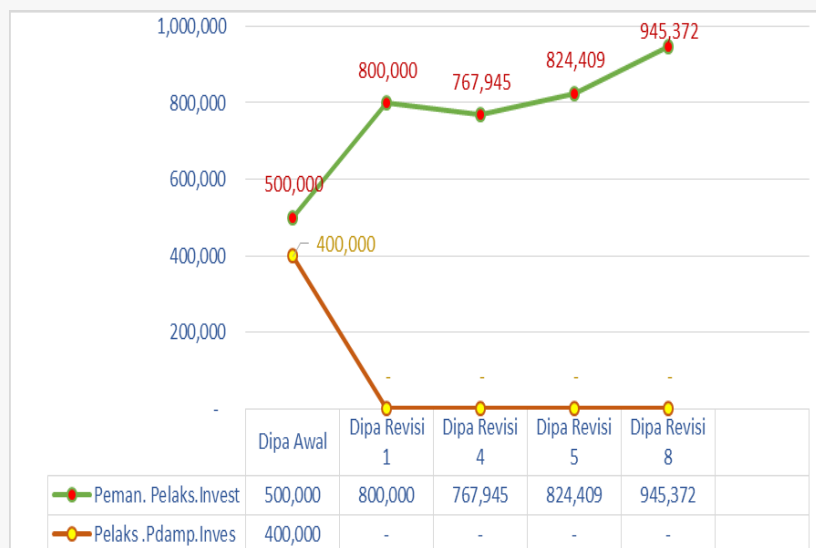
rangka memberi gambaran mengenai perkembangan dan kemajuan, identifikasi atas permasalahan serta antisipasi ataupun upaya pemecahannya terhadap persiapan pelaksanaan KPBU infrastruktur SDA sehingga dapat dinilai apakah KPBU tersebut layak untuk dikerjasamakan dengan badan usaha.

Kesimpulan yang dapat diperoleh dalam paket kegiatan ini adalah :

- 1) Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air tengah melakukan beberapa persiapan menuju tahapan transaksi proyek KPBU bidang sumber daya air baik solicited maupun unsolicited. Untuk proyek KPBU SDA Solicited yaitu Bendungan Merangin, Bendungan Bodri, SPAB Kedunglanggar, dan SPAB Kuwil Terintegrasi SPAM Regional Bimantara. Sedangkan proyek KPBU SDA Unsolicited yaitu Pemeliharaan Bendungan dan BOT PLTM Bintang Bano, SPAB Sidan (bundling dengan SPAM Ayung I) dan SPAB Karian barat (bundling dengan SPAM Karian Barat).
- 2) Dit.PPISDA juga telah menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air sektor Bendungan.
- 3) Penyampaian informasi telah dilakukan publikasi melalui media internal yang disebarluaskan ke internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan (DJPI), unit organisasi terkait di Kementerian PUPR, mitra kerja dan stakeholder. Telah terbit 4 (empat) edisi bulletin Direktorat PPISDA.

Pagu Anggaran →

Gambar 4.16.
Kronologis Anggaran
pada Komponen
Pelaksanaan
Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Pembiayaan
Infrastruktur Sumber
Daya Air



Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
1	19 April 2021	Pembahasan Buletin Edisi I dan Laporan Bulan April Dit. PPISDA
2	25 Mei 2021	Pembahasan Buletin dan Laporan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Bulan Mei TA 2021
3	28 Juni 2021	Focus Group Discussion Penyusunan Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bendungan
4	23 Juli 2021	Pembahasan Buletin Edisi II dan Laporan Bulan Juni Dit. PPISDA
5	6 September 2021	Sharing Session Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bendungan Melalui KPBU
6	13 Oktober 2021	Pembahasan Buletin Edisi III dan Laporan Bulan Oktober TA 2021
7	16 November 2021	Koordinasi dan Survei Lapangan Kinerja Pemantauan dan Evaluasi Infrastruktur Bendungan (Studi Kasus Bendungan Tapin)
8	26-27 November 2021	FGD Pembahasan Draf Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bendungan Melalui KPBU
9	15 Desember 2021	Finalisasi Draft Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bendungan Melalui KPBU dan Buletin Dit. PPISDA Edisi IV Tahun 2021

Rekomendasi dan beberapa isu yang perlu ditindaklanjuti yaitu:

1. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Bendungan Melalui KPBU perlu disepakati agar hasilnya tidak sekedar digunakan sebagai bahan untuk melakukan supervisi;
2. Pedoman pemantauan dan evaluasi diharapkan dapat diinformasikan ke unit organisasi terkait;
3. Penerbitan buletin agar tepat waktu mengingat buletin berisi informasi dan laporan mengenai KPBU sumber daya air.

RINCIAN OUTPUT 8 :

Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA(EAL002)

KOMPONEN / INDIKATOR		Target Rens-tra	Paket Kegiatan		Capaian	Pagu Awal	Pagu Revisi
						(dlm ribuan)	
Komponen 1	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Laporan	1.	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1 Laporan	Rp 300.000,-	Rp 216.657,-

Tabel 4.11. Target dan Capaian pada Rincian Output 8 (Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA)

RO8.K1 KINERJA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR

Pencapaian terhadap Komponen tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan Paket kegiatan berikut ini:

⇒ Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Untuk mewujudkan pemerintahan yang handal, profesional dan bertanggung jawab diperlukan upaya yang komprehensif dari setiap unsur penyelenggara negara dalam

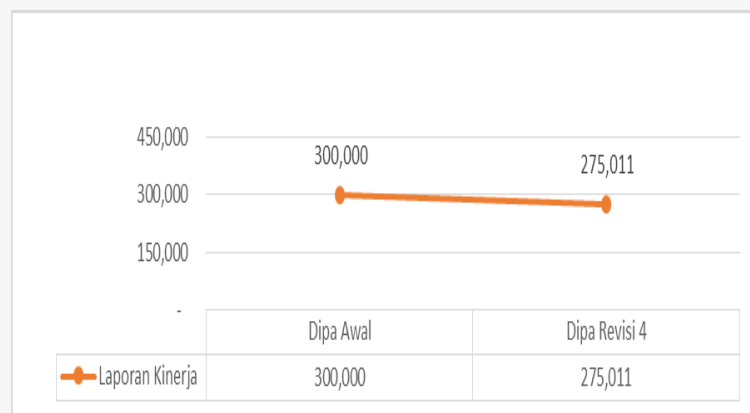
menjalankan berbagai tugas dan fungsinya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyediakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) di setiap akhir tahun anggaran sebagai bukti penilaian atas kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Berbagai informasi yang terdapat dalam LaKIP dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab publik setiap instansi pemerintah karena di dalamnya memuat rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan dan akuntabilitas keuangan. Semua informasi tersebut dapat diakses publik sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan menilai kinerja yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, amanah dan akuntabel.

LaKIN memberikan informasi mengenai pencapaian misi sebagai upaya terukur mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu, LaKIN memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana publik terhadap jasa atau produk prima yang dihasilkan (excegency) dan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali (equity).

Pagu Anggaran ➔

Gambar 4.17.
Kronologis Anggaran pada
Komponen Kinerja
Pembiayaan Infrastruktur
Sumber Daya Air



Kegiatan yang telah di laksanakan yaitu:

No	Tanggal kegiatan	Nama Kegiatan
a	23 April 2021	Evaluasi Capaian Kinerja Q1 TA 2021 diselenggarakan dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja Dit. PPISDA
b	24 Agustus 2021	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Ouartal II dan Rencana Strategis Capaian Kinerja Ouartal III Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2021- via zoom
c	23-24 September 2021	Konsinyasi rencana penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan TA 2021
d	26 Oktober 2021	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Ouartal III Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA TA. 2021- via zoom
e	13 Desember 2021	Kegiatan Konsinyasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Pembahasan Draf Laporan Tahunan Direktorat PPISDA TA 2021

4.2 Perbandingan Capaian Kinerja

4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja TA 2020 dan TA 2021 berdasarkan RENSTRA

Pada tabel 4.11 dapat dilihat perbandingan capain kinerja tahun anggaran 2020 dengan capaian kinerja tahun 2021 berdasarkan target yang ada di RENSTRA. Pada tahun lalu capaian output mencapai angka 20 lebih besar dari target sebesar 19 dengan presentasi angka sebesar 24,56 % dari target sebesar 25 %. Sedangkan pada tahun ini capain output hanya 13 lebih rendah dari target renstra sebesar 14 dengan capaian presentasi tahun ini sebesar 24,25 % dari target 25 %.

SASARAN STRATEGIS /SASARAN PROGRAM /IKSP/SK/IKK /OUTPUTKEGIATAN /INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN		SATUAN	TARGET RENSTRA 2020	CAPAIAN KINERJA 2020	% CAPAIAN 2020	TARGET RENSTRA 2021	CAPAIAN KINERJA 2021	% CAPAIAN 2021
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan			19	20	24,56 %	14	13	24,25%
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air								
PELAKSANA : DIREKTORAT PELAKSANAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR								
Output Kegiatan :								
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan SDA	Rekomendasi Kebijakan	4	4	100%	2	2	100%
	1 Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	2	50%	1	1	50%
	2 Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	2	50%	1	1	50%
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	1	1	100%
	1 Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	1	1	100%
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	3	3	100%	4	3	80%
	1 Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	2	2	40%	1	1	40%
	2 Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1	60%	3	2	40%
4	Dukungan Kerjasama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	1	1	100%
	1 Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja sama Investasi Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100%	1	1	100%
5	Proyek KPBU SDA yang di kerjasamakan	Kesepakatan	2	3	90%	2	2	80%
	1 Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Dokumen	2	3	90%	1	1	60%
	2 Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur SDA	Kesepakatan	1	0	0%	2	1	20%
6	NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	4	4	100%	2	2	100%
	1 Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur SDA	NSPK	4	4	100%	2	2	100%
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan SDA	Laporan	3	3	100%	1	1	100%
	1 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	3	3	100%	1	1	100%
8	Kinerja Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	1	1	100%	1	1	100%
	1 Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Laporan	1	1	100%	1	1	100%

Tabel 4.12. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja TA 2020 dengan TA 2021 berdasarkan Target Renstra

4.2.2 Perbandingan Capaian Kinerja TA 2020 dan TA 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020, target kinerja sebesar 25 % dan capaian kinerja sebesar 24,56 %. Sedangkan pada tahun anggaran 2021 target kinerja masih sebesar 25 % dan capaian kinerja sebesar 24,25%. Perbedaan capaian tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2021 ini untuk transaksi KPBU baru 1 target yang mencapai tahap draft perjanjian kerjasama, hal itu disebabkan oleh banyaknya kendala dan rintangan selama proses pelaksanaan.

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET PK 2020	CAPAIAN 2020	TARGET PK 2021	CAPAIAN 2021
SP. MENINGKATNYA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA				
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100 %	98,93 %	100 %	61,60 %
SK. MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERUMAHAN				
IKK. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25 %	24,56 %	25 %	24,25 %

Tabel 4.13. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja TA 2020 dengan TA 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja

Dari tabel di atas juga dapat dilihat, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air juga mendukung IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif yang capaian kinerjanya sebesar 61,60 % turun dari tahun lalu yang capainya bisa mencapai menjadi 98,93 % dari target 100 %. Untuk capaian IKK Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

tahun ini sebesar 24,25 % lebih rendah dari capaian mendukung pada capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif yang

4.2.3 Perbandingan Capaian Kinerja TA 2020 dan TA 2021 berdasarkan Realisasi anggaran yang terdapat pada E-monitoring Online

Pada tabel 4.13 , dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Direktorat PPISDA secara horizontal antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Jika dilihat, antara capaian tahun 2020 dengan capaian tahun 2021 terdapat kenaikan sedikit pada realisasi keuangannya, yaitu naik 0,11 %. Dengan perincian sebagai berikut capaian kinerja keuangan pada tahun 2020 sebesar 90,61 % dengan nilai Rp 10.081.213.000,00 dari nilai pagu setelah revisi sebesar Rp 11.042.309.000,00 . Sedangkan capaian kinerja keuangan pada tahun 2021 sebesar 90,72 % dengan nilai Rp 10.022.757.000,00 dari nilai pagu setelah revisi sebesar Rp 11.048.405.000,00. Untuk Capaian Fisik tahun 2020 lebih tinggi 0,15 point dari yaitu sebesar 91,27 %, sedangkan capaian fisik tahun 2021 sebesar 91,12 %.

No	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator		Pagu 2020 (ribuan)	Realisasi 2020 (ribuan)	Keuangan		Fisik		Pagu 2021 (ribuan)	Realisasi 2021 (ribuan)	Keuangan		Fisik	
					Renc 2020 (%)	Real 2020 (%)	Renc 2020 (%)	Real 2020 (%)			Renc 2021 (%)	Real 2021 (%)	Renc 2021 (%)	Real 2021 (%)
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan														
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air														
Total Realisasi			11,042,309	10,081,213	100	90.61	100	91.27	11,048,405	10,022,757	100	90.72	100	91.12
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1,893,811	1,788,415	100	94.40	100	95.00	905,791	774,013	100	81.89	100	82.50
	1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	913,953	841,845	100	92.03	100	92.50	596,379	555,450	100	93.14	100	94.00
	2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	979,858	946,570	100	96.77	100	97.50	309,412	218,563	100	70.64	100	71.00
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		945,822	857,094	100	90.62	100	91.00	1,488,774	1,259,732	100	90.62	100	91.00
	1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	945,822	857,094	100	90.62	100	91.00	1,488,774	1,259,732	100	84.62	100	85.00
3	Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		3,602,995	3,272,648	100	93.27	100	93.75	4,902,802	4,570,369	100	74.28	100	74.67
	1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	2,802,995	2,490,108	100	88.71	100	89.50	1,760,000	1,730,555	100	98.33	100	99.00
	2	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	800,000	782,540	100	97.82	100	98.00	3,142,802	2,839,814	100	50.22	100	50.33
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		456,599	445,383	100	97.54	100	98.00	727,922	603,324	100	82.88	100	83.00
	1	Jumlah Menyiapkan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	456,599	445,383	100	97.54	100	98.00	727,922	603,324	100	82.88	100	83.00
5	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		1,539,155	1,413,213	100	90.41	100	91.00	673,665	543,803	100	80.72	100	80.72
	1	Jumlah Perumusan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,539,155	1,413,213	100	90.41	100	91.00	673,665	543,803	100	80.72	100	80.72
6	Proyek KPBU Sumber Daya Air Yang Siap Dikerjasamakan		1,468,500	1,328,347	100	89.74	100	90.25	2,166,922	2,044,809	100	95.87	100	96.50
	1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	979,500	900,073	100	91.90	100	92.50	708,377	698,948	100	98.67	100	99.00
	2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	489,000	428,274	100	87.58	100	88.00	479,045	445,788	100	93.06	100	94.00
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		959,549	834,066	100	85.56	100	86.00	945,372	918,425	100	97.15	100	98.00
	1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	959,549	834,066	100	85.56	100	86.00	945,372	918,425	100	97.15	100	98.00
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air		175,878	142,047	100	83.61	100	84.00	216,657	208,355	100	96.17	100	97.00
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	175,878	142,047	100	83.61	100	84.00	216,657	208,355	100	96.17	100	97.00

Tabel 4.14. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja TA 2020 dengan TA 2021 berdasarkan Realisasi anggaran E-monitoring Online 31 Desember 2021, pukul 16.00 WIB

4.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021 berdasarkan e-monitoring PUPR adalah sebesar Rp 10.022.757.000,00 atau sekitar 90.72 % dari pagu yang diterima yaitu sebesar Rp 11.048.405.000,00

Kode KRO	KRO	Satuan KRO	RO	Satuan RO	Pagu		Realisasi		Keuangan		Fisik		
					(dalam Ribuan)		(dalam Ribuan)		RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	Kinerja (%)
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air					Rp 11.048.405,00		Rp	10.022.757,00	100,00	90,72	100,00	91,12	91,12
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	Rekomendasi Kebijakan	Rp	905.791,00	Rp	774.013,00	100,00	85,45	100,00	86,14	86,14
			Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Rp	1.488.774,00	Rp	1.259.732,00	100,00	84,62	100,00	85,00	85,00
			Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Rp	4.902.802,00	Rp	4.570.369,00	100,00	93,22	100,00	93,50	93,50
			Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	Rp	727.922,00	Rp	603.324,00	100,00	82,88	100,00	83,00	83,00
AEE	Kemitraan	Kesepakatan	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang Siap Dikerjakamkan	Kesepakatan	Rp	1.187.422,00	Rp	1.144.736,00	100,00	96,41	100,00	96,98	96,98
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	Rp	673.665,00	Rp	543.803,00	100,00	80,72	100,00	80,98	80,98
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	Rp	945.372,00	Rp	918.425,00	100,00	97,15	100,00	98,00	98,00
			Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	Rp	216.657,00	Rp	208.355,00	100,00	96,17	100,00	97,00	97,00

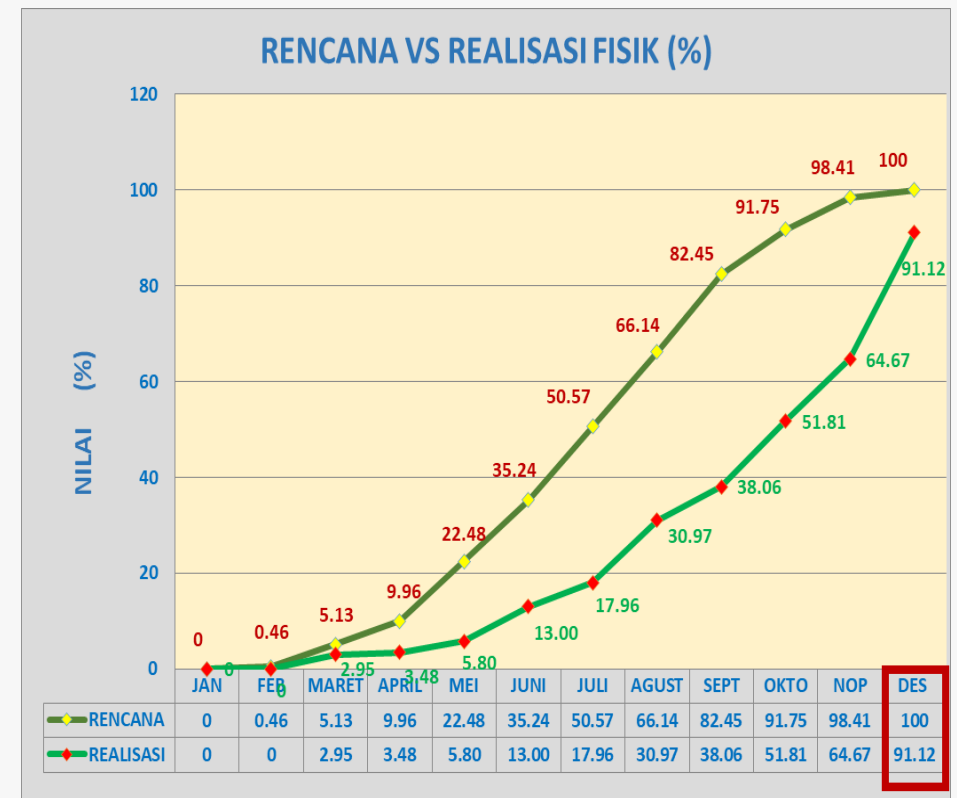
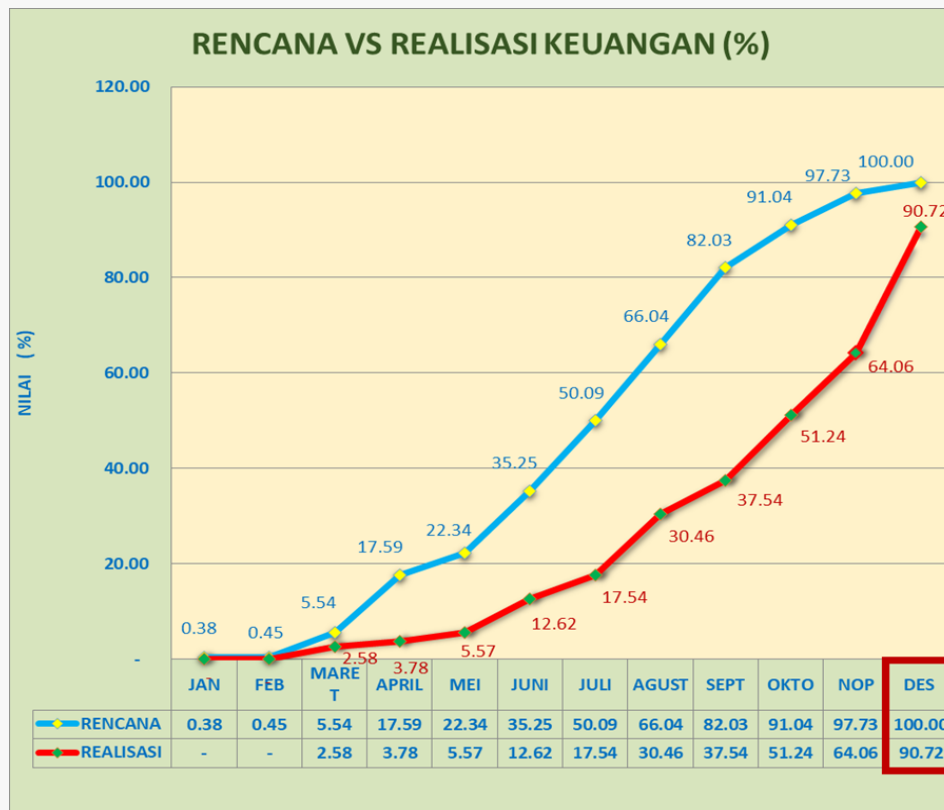
Tabel 4.15. Tabel Realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output sesuai Emonitoring Online status 31 Desember 2021

Komponen	Kode	Paket Kegiatan	S/K	Pagu		Realisasi		Keuangan		Fisik		
				(dalam Ribuan)		(dalam Ribuan)		RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	Kinerja (%)
Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				Rp	11.048.405,00	Rp 10.022.757,00		100,00	90,72	100,00	91,12	91,12
	4197.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rp	8.025.289,00	Rp	7.207.438,00	100,00	89,81	100,00	90,14	90,14
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.ABF.001.051. A	Penyusunan Bahan Masukan Program dan Rencana Kerja Direktorat PPISDA TA. 2022	S	Rp	596.379,00	Rp	555.450,00	100,00	93,14	100,00	94,00	94,00
Penyusunan Identifikasi Proyek KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.ABF.001.052. B	Penyusunan Profil dan Identifikasi Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	S	Rp	309.412,00	Rp	218.563,00	100,00	70,64	100,00	71,00	71,00
Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.ABF.002.051. A	Penyusunan Studi Pendahuluan KPBU Sektor SDA TA. 2021	S	Rp	1.488.774,00	Rp	1.259.732,00	100,00	84,62	100,00	85,00	85,00
Penyusunan Kajian Awal Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.ABF.003.051. A	Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan KPBU Sektor Sumber Daya Air TA. 2021	S	Rp	1.760.000,00	Rp	1.730.555,00	100,00	98,33	100,00	99,00	99,00
Penyusunan Kajian Akhir Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.ABF.003.052. A	Multipurpose Dam-Final Business Case and Bidding Documents Development	K	Rp	50.000,00	Rp	-	100,00	0,00	100,00	0,00	-
	4197.ABF.003.052. B	Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan KPBU Bendungan TA. 2021	S	Rp	512.754,00	Rp	259.766,00	100,00	50,66	100,00	51,00	51,00
	4197.ABF.003.052. D	Penyusunan Dokumen Final Business Case (FBC) Proyek KPBU Bendungan Bodri	K	Rp	2.580.048,00	Rp	2.580.048,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyiapan Dokumen Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.ABF.004.051. A	Penyiapan Dokumen Pengusahaan Dukungan Pemerintah dalam Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Daya Air	S	Rp	727.922,00	Rp	603.324,00	100,00	82,88	100,00	83,00	83,00

Komponen	Kode	Paket Kegiatan	S/K	Pagu		Realisasi		Keuangan		Fisik		
				(dalam Ribuan)		(dalam Ribuan)		RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	Kinerja (%)
	4197.AEE	Kemitraan		Rp	1.187.422,00	Rp	1.144.736,00	100,00	96,41	100,00	96,98	96,98
Pelaksanaan Dukungan dan Penyiapan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.AEE.001.051. A	Penyiapan Pelaksanaan Transaksi KPBU Infrastruktur Sumber Daya Air	S	Rp	708.377,00	Rp	698.948,00	100,00	98,67	100,00	99,00	99,00
Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.AEE.001.052. A	Pelaksanaan Transaksi dan Pendampingan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Bendungan	S	Rp	479.045,00	Rp	445.788,00	100,00	93,06	100,00	94,00	94,00
	4197.AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria		Rp	673.665,00	Rp	543.803,00	100,00	80,72	100,00	80,72	80,72
Perumusan NSPK Kebijakan Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.AFA.001.051. A	Penyusunan Pedoman Service Level Agreement KPBU Sektor Sumber Daya Air	S	Rp	535.665,00	Rp	438.168,00	100,00	81,80	100,00	82,00	82,00
	4197.AFA.001.051. B	Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	S	Rp	138.000,00	Rp	105.635,00	100,00	76,55	100,00	77,00	77,00
	4197.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		Rp	1.162.029,00	Rp	1.126.780,00	100,00	96,97	100,00	97,81	97,81
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.EAL.001.051. A	Pemantauan Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	S	Rp	945.372,00	Rp	918.425,00	100,00	97,15	100,00	98,00	98,00
Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	4197.EAL.002.051. A	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun 2021	S	Rp	216.657,00	Rp	208.355,00	100,00	96,17	100,00	97,00	97,00

Tabel 4.16. Tabel Realisasi anggaran berdasarkan Komponen sesuai Emonitoring Online status 31 Desember 2021

Gambar 4.18. Sandingan Rencana VS Realisasi Keuangan perbulan selama TA 2021



Gambar 4.19. Rencana VS Realisasi Fisik perbulan selama TA 2021

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT		RINCIAN OUTPUT	PAGU AWAL	PAGU REVISI AKHIR	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKTO	NOP	DES (KEU)	DES (%)
TOTAL			22,000,000	11,048,405	-	-	153,455	563,814	829,549	1,880,818	2,614,379	3,669,977	4,522,810	6,173,120	7,078,147	10,022,757	90.72%
ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur SDA	1,200,000	905,791	-	-	31,234	162,497	193,510	284,680	296,246	315,307	335,501	415,367	514,190	774,013	85.45%
		Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur SDA	2,100,000	1,488,774	-	-	15,039	65,629	113,222	299,125	617,598	742,488	792,127	857,608	903,227	1,259,732	84.62%
		Pra Studi Kelayakan Pembiayaan Infrastruktur SDA	11,550,000	4,902,802	-	-	7,652	37,212	38,322	597,266	690,815	1,203,208	1,829,434	2,812,816	3,167,323	4,570,369	93.22%
		Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	700,000	727,922	-	-	14,754	123,062	151,472	200,278	215,772	315,972	340,420	403,960	464,390	603,324	82.88%
AEE	Kemitraan	Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan	4,000,000	1,187,422	-	-	31,398	82,079	120,428	155,694	369,775	563,929	599,077	816,767	911,196	1,144,736	96.41%
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	1,200,000	673,665	-	-	-	-	-	80,238	119,066	135,280	179,485	275,055	318,093	543,803	80.72%
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	950,000	945,372	-	-	19,800	59,435	178,695	229,637	271,207	359,296	393,169	524,600	651,492	918,425	97.15%
		Kinerja Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	300,000	216,657	-	-	33,578	33,900	33,900	33,900	33,900	34,497	53,597	66,947	148,236	208,355	96.17%

Tabel 4.17. Tabel Realisasi anggaran perbulan selama TA 2021 berdasarkan Rincian Output

(sumber emonitoring online)

4.4 Tindak Lanjut atas Rekomendasi Sakip TA. 2020

4.4.1 Tindak Lanjut atas Rekomendasi LAKIN 2020

Pada laporan kinerja tahun 2020, terdapat beberapa rekomendasi yang ingin di tindaklanjuti pada tahun anggaran 2021. Berikut ini adalah rekomendasi tahun 2020 dan tindak lanjutnya di tahun 2021 sebagai berikut :

REKOMENDASI LAKIN TA 2021		TINDAK LANJUTNYA	
1	Proyek KPBU Bendungan Merangin		
	a.	Diperlukan Pembahasan Fiskal dengan antara DJPI dan Ditjen. SDA untuk Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air.	Direktorat PPISDA telah berkoordinasi dengan Dit. Bendungan dan Danau, Ditjen SDA bahwa besaran AP yang dapat dialokasikan sementara yaitu Rp. 350 M/tahun, untuk kekurangannya akan dilakukan blended finance maupun pemanfaatan PLTA kedepannya.
	b.	Dit. PPISDA sedang melakukan persiapan kelengkapan dokumen Kesepakatan Induk Fasilitasi PDF, antara lain:	Kesepakatan Induk telah ditandatangani oleh Ditjen. Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR dan Ditjen. Pengelolaan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan pada tanggal 7 September 2021 dengan Nomor: DK-09/PR/2021 dan 04/PKS/DP/2021.
		1). SK Tim KPBU;	SK Tim KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Bendungan Merangin telah di tandatangani Dirjen Pembiayaan Infrastruktur pada tanggal 30 April 2021 dengan Nomor: 28/KPTS/Dp/2021.
		2) Hasil Konsultasi Publik;	Tahun 2019
		3) Rencana Penggunaan Skema AP, Informasi terkait Kapasitas Fiskal; dan	Telah ditandatangani surat Konfirmasi pendahuluan AP Proyek KPBU Bendungan Merangin dan Integrasinya dengan SPAM pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan Nomor: S-163/PR.6/2021 yang disampaikan bahwa AP dialokasikan sebagai belanja wajib dalam tahun jamak yang akan diprioritaskan, berkoordinasi dengan kementerian keuangan terkait konsolidasi fiskal tahun 2023, dan melanjutkan proses

			konfirmasi final AP.
		4) Serta Kajian yang memuat referensi internasional atas Proyek KPBU sejenis yang telah berhasil.	<p>Direktorat PPISDA telah menyusun kajian ringkas terkait referensi internasional atas proyek KPBU sejenis yang membahas proyek yaitu antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Havrias Dam, Greece; b. Afsluitdijk Dam, Netherlands; c. Bujagali Dam, Uganda; d. Ruzizi III hydropower, Burundi & Congo; e. Ilaguen Dam, Philippines; dan f. PPP Project Guerdane, Morocco.
		5) Timeline dan rencana kerja PDF	Telah dilakukan Rapat Pembahasan timeline Bendungan pada tanggal 26 Februari 2021 dan Rapat Pembahasan SPAM Merangin pada tanggal 5 Maret 2021. Hasil dari kedua rapat tersebut adalah Berita Acara Pelaksanaan Proyek KPBU Bendungan Merangin yang Terintegrasi dengan SPAM sampai ke Sambungan Rumah. Berita Acara telah di tandatangani oleh Direktur PPISDA, Direktur Bendungan dan Danau, Direktur ATAB dan Direktur Air Minum.
	c.	Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan stakeholder terkait (Kementerian ESDM, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PT. PLN) terkait lingkup kerja sama dan PJPK Proyek KPBU.	Berdasarkan Surat Balasan Menteri Keuangan terkait Persetujuan PDF No. S-41/MK.08/2021 pada tanggal 17 Januari 2021 bahwa pembangunan PLTA tetap dibangun namun tidak dalam satu lingkup dengan Bendungan namun akan dibahas potensi pengembangannya pada FBC Bendungan Merangin.
	d.	Diperlukan Pembahasan lebih lanjut mengenai MoU dengan Kementerian ESDM dan PT. PLN	Berdasarkan Surat Balasan Menteri Keuangan terkait Persetujuan PDF No. S-41/MK.08/2021 pada tanggal 17 Januari 2021 bahwa pembangunan PLTA tetap dibangun namun tidak dalam satu lingkup dengan Bendungan sehingga belum diperlukan pembahasan MoU terkait PJPK Gabungan

			antara Kementerian PUPR dengan Kementerian ESDM.
2 Proyek KPBu Bendungan Matenggeng			
	a.	Perlu ada keputusan final mengenai kepastian Bendungan Matenggeng menjadi proyek yang akan didanai melalui skema KPBu.	Bendungan Matenggeng didrop berdasarkan Surat Direktur SSPSDA No. SA.01-Aj/176 tanggal 24 Maret 2021 perihal Penyampaian Perubahan ke-3 Daftar Proyek Bidang SDA 2020-2024 dengan Kebutuhan Pendanaan Tinggi untuk Pertimbangan Pendanaan KPBu
	b.	Ditjen. SDA diharapkan dapat menyampaikan surat perihal pergantian usulan proyek ESP ADB dari Bendungan Pasir Kopo menjadi Bendungan Matenggeng.	-
	c.	Jika bendungan matenggeng menjadi proyek KPBu, maka Ditjen SDA/BBWS Citanduy harus mengalokasikan anggaran untuk penyusunan Amdal dan LARAP.	-
		Studi relokasi lahan permukiman akan ditindaklanjuti melalui studi LARAP.	-
3 Proyek KPBu Bendungan Bodri			
	a.	Ditjen. SDA perlu mengusulkan Proyek Pembangunan Bendungan Bodri sebagai PSN sehingga terdapat kepastian terkait pembebasan lahan.	Bendungan Bodri telah terkonfirmasi sebagai PSN berdasarkan pembahasan dalam Rapat Pembahasan Aspek Legal dan Pemeliharaan Bendungan Bodri dengan KPPIP tanggal 26 November 2021

	b.	Diperlukan koordinasi antara DJPI dan Ditjen. SDA terkait alokasi anggaran untuk kebutuhan pembayaran ketersediaan layanan dari proyek KPBU Bendungan Bodri.	<p>Telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Rapat Koordinasi Potensi Integrasi Sumber Pendanaan dan Mekanisme Penganggaran KPBU Availability Payment Sektor Sumber Daya Air pada tanggal 25 Oktober 2021; dan 2). Rapat Pembahasan Kemampuan Fiskal PJPB KPBU Sektor SDA serta Kajian Ekonomi dan Finansial FBC Proyek KPBU Bendungan Bodri pada tanggal 5 November 2021, untuk berkoordinasi terkait kemampuan fiskal Ditjen. SDA sebagai PJPB dalam pembayaran AP proyek KPBU Bendungan Bodri. Dit. PPISA masih terus berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas (Dit. Pengairan dan Irigasi), Ditjen. SDA. Biro PAKLN terkait pembahasan AP dan kapasitas fiskal Ditjen. SDA.
4	Proyek KPBU SPAB Karian Barat		
	a.	Perlu dilakukan sinkronisasi pelaksanaan SPAB dan SPAM antara Ditjen. SDA dan Ditjen. CK sehingga didapatkan integrasi pengerjaan proyek dari daerah hulu hingga hilir agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan tidak terjadi risiko interface.	<p>Telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Rapat Koordinasi dengan BBWS C3 tentang Integrasi SPAB dan SPAM Karian Barat pada tanggal 6 Januari 2021; dan 2). Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Integrasi Proyek KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat, Provinsi Banten pada tanggal 2 Februari 2021. <p>Berdasarkan hasil rapat, SPAB Karian Barat dan SPAM Karian Barat akan diintegrasikan sehingga tidak terdapat risiko interface.</p>
	b.	Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut antara DJPI, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PT. Adhi Karya terkait integrasi proyek SPAB Karian Barat ke dalam proyek SPAM Karian Barat.	<p>Telah dilaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Rapat Koordinasi dengan BBWS C3 tentang Integrasi SPAB dan SPAM Karian Barat pada tanggal 6 Januari 2021; 2). Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Integrasi Proyek

			<p>KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat, Provinsi Banten pada tanggal 2 Februari 2021; dan</p> <p>3. Rapat Koordinasi dengan Direktorat ATAB Ditjen SDA pada tanggal 8 Februari 2021. Berdasarkan hasil rapat, DJPI, Ditjen. SDA, Pemda terkait, dan konsorsium calon pemrakarsa (PT. Adhi Karya, PT. KTI, dan PT. UCS) setuju terkait pengintegrasian SPAB Karian Barat dan SPAM Karian Barat.</p>
	c.	Perlu dilakukan koordinasi antara Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PDAM terkait kesepakatan lokasi bangunan prasedimentasi	Dengan adanya integrasi SPAB Karian Barat dan SPAM Karian Barat, maka bangunan prasedimentasi sudah termasuk kedalam desain yang dibuat oleh konsorsium calon pemrakarsa.
	d.	Perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai detail kebutuhan air bagi industri terutama pada Kawasan Industri Kota Cilegon antara DJPI, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, PDAM, dan pelaku industri terkait.	Telah dilaksanakan Audiensi dengan Gubernur Banten terkait Tindak Lanjut Proyek KPBU SPAB dan SPAM Karian Barat pada tanggal 22 Maret 2021, yang menyatakan bahwa terdapat kebutuhan untuk industri, dan Pemda mendukung penyediaan kebutuhan air untuk masyarakat dan industri.
5 Proyek KPBU SPAB Sidan			
	a.	Perlu dilakukan sinkronisasi pelaksanaan SPAB Sidan dan SPAM Ayung antara DJPI, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PDAM terkait perencanaan desain dan jumlah IPA yang akan digunakan	Berdasarkan Rapat Koordinasi dengan Perusda Bali pada tanggal 9 September 2021, pihak Perusda Bali, PT. TRGI, Konsultan RWS (Ditjen. SDA) dan Konsultan PPC (Ditjen. Cipta Karya) telah berkoordinasi dan menyepakati desain 1 IPA sesuai usulan PT. TRGI dengan lokasi bergeser ± 150 m lebih hilir.
	b.	Perlu dilakukan pembahasan	Surat Penambahan Unit Air Baku ke dalam Lingkup KPBU

		dengan Ditjen. SDA terkait kapasitas fiskal untuk pembayaran Availability Payment.	Unsolicited SPAM Ayung I (Bundling) kepada Gubernur Bali telah di tandatangani oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tanggal 16 September 2021 dengan nomor SA.04.04-Dp/250 dan telah dikirimkan dengan tembusan Menteri PUPR, Dirjen SDA, Dirjen Cipta Karya dan Perusda Bali sehingga lingkup Proyek Unsolicited SPAM Ayung I termasuk dengan unit air baku (dengan PJPk Gubernur Bali) dengan skema pengembalian investasi yang digunakan yaitu user charge.
	c.	Perlu dilakukan sinkronisasi timeline pelaksanaan antara DJPI, Ditjen. SDA, Ditjen. CK, Pemda, dan PDAM sehingga didapat integrasi pengerjaan proyek dari daerah hulu hingga hilir agar dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan tidak terjadi risiko interface.	Berdasarkan Rapat Pemantauan Proses KPBU pada tanggal 4 November 2021 bahwa PJPk Proyek Unsolicited (Gubernur Bali) akan mempertimbangkan dan mengkaji kembali penambahan unit air baku pada kelayakan proyek Unsolicited SPAM Ayung I.

Tabel 4.18. Tindak Lanjut atas rekomendasi laporan kinerja tahun 2020

4.4.2 Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP TA. 2020

Berdasarkan surat no: PR.03.04-PK/261 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2020, yang bertindak selaku Evaluator adalah Petugas Sakip dari Direktorat pengembangan Sistem dan Strategi Pembiayaan didapatkan hasil evaluasi terhadap SAKIP Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT/NILAI MAKS	NILAI HASIL EVALUASI
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	25,23 %
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	19,73 %
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	12,80 %

4.	Evaluasi Kinerja	10 %	6,75 %
5.	Capaian Kinerja	20 %	12,22 %
	TOTAL	100 %	76,74 %

Tabel 4.19. Komponen, Bobot dan nilai hasil evaluasi SAKIP TA 2020 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Dari table 4.12 dapat dilihat Hasil Evaluasi SAKIP Direktorat PPISDA TA. 2020 adalah 76,74% dengan kategori BB(sangat Baik)lebih tinggi dari tahun 2019 yang persentasi penilaiannya sebesar 75,21% dengan kategori BB (Sangat Baik). Terhadap kelemahan yang masih ada, evaluator memberikan rekomendasi kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI EVALUATOR	TINDAK LANJUT
1	PERENCANAAN	
	a. Perlu menyampaikan usulan terkait mekanisme revidi terhadap Dokumen Renstra; b. Perlu dilakukan revidi terhadap Dokumen Renstra tingkat Eselon II secara berkala.	akan segera dilaksanakan revidi renstra sesuai arahan dari Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebagai kordinator penyusun Renstra DJPI
2	PENGUKURAN KINERJA	
	a. Perlu dirumuskan mekanisme pemberian reward & punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja; b. Perlu melakukan monitoring secara berkala terhadap target kinerja sampai staf.	Terkait reward dan punishment, Direktur Pelaksanaan Infrastruktur Sumber Daya Air menyampaikan perlunya meningkatkan kedisiplinan jam masuk kantor dan laporan kegiatan setiap harinya mengingat saat ini situasi pandemik, staf di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Sumber Daya Air banyak WFH sesuai jadwal yang telah di tentukan

3	PELAPORAN KINERJA	
	Informasi yang ada pada laporan kinerja perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan pelaksanaan kegiatan organisasi	Setiap Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah dikumpulkan menjadi satu dalam laporan mingguan yang kemudian dimasukkan ke dalam <i>e cloud</i> untuk di simpan dan digunakan siapa sj yg butuh data tersebut.
4	EVALUASI KINERJA	
	Perlu ada tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan	Pelaksanaan acara ini dapat sebagai <i>evidence</i> yang merupakan tindak lanjut evaluasi internal secara berkala oleh Direktorat Pelaksanaan Infrastruktur Sumber Daya Air telah dilaksanakan tindak lanjut tersebut.
5	CAPAIAN KINERJA	
	Capaian kinerja output dan outcome perlu ditingkatkan lebih baik dari tahun sebelumnya	Melakukan koordinasi yg lebih intensif antara subdirektorat di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air demi pencapaian kinerja yang lebih maksimal.

Tabel 4.20. Rekomendasi Evaluator terhadap evaluasi SAKIP 2020 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Catatan : Berita Acara dr hasil evaluasi sakip dan nota dinas tentang tindak lanjut atas rekomendasi terlampir.

4.5 Analisis Efisiensi dan Efektifitas

Tahun 2021 merupakan tahun ke 2 Pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia, Kementerian PUPR melakukan upaya realokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka . Pada awal tahun 2021, Direktorat PPISDA mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar) tidak termasuk anggaran layanan perkantoran seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 3 tentang DIPA. Kemudian terjadi 4 x refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, sehingga anggaran Direktorat PPISDA menjadi Rp11.048.405.000,00 (sebelas milyar empat puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah). namun hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi target dari masing-masing output. Capaian kinerja Direktorat tetap bisa mencapai 24,25 % dari target PK sebesar 25 %. Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran capaian kinerja Direktorat PPISDA mencapai 90,72 % setara dengan Rp 10.022.757.000,00 (sepuluh milyar dua pulu dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pamanfaatan teknologi di era pandemik ini menjadi alternative paling efektif dalam mencapai target yang telah di rencanakan. Keterbatasan pertemuan karena harus menjaga jarak, menjadikan beberapa kegiatan/rapat-rapat yang harusnya dilaksanakan tatap muka, kini lebih banyak melalui pertemuan virtual. Penggunaan aplikasi dan media komunikasi berbasis teknologi informasi seperti *zoom meeting*, *google working space*, *whatsapp* *Cisco Webex* yang memudahkan konektivitas kerja yang saat ini sering dilakukan secara *hybrid*.



BAB 5

PENUTUP

Penutup

5.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja ini merupakan bentuk konkrit dari pertanggungjawaban APBN yang telah diamanatkan kepada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Awal tahun 2021 Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air memiliki pagu sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) yang kemudian mengalami revisi anggaran karena ada nya refocusing anggaran sebanyak 4x yang mengakibatkan pagu anggaran Direktorat PPISDA pada menjelang akhir tahun sebesar Rp 11.048.405.000,00 (sebelas milyar empat puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah).

Capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air pada Tahun 2021 ini berdasarkan data emonitoring online status tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 10.022.757.000,00 yaitu 90,72% realisasi anggaran, dan 91,12 % realisasi fisiknya. Sedangkan capaian berdasarkan target renstra sebesar 13 output dari target sebesar 14 output dengan perincian : 7 rekomendasi kesepakatan, 1 NSPK dan 1 draft NSPK, 1 draft perjanjian kerjasama dan 2 laporan. Untuk capaian atas target Perjanjian Kinerja sebesar 24,25 % dari target sebesar 25 %.

Pandemi Covid-19 di tahun ke 2 ini tetap mengupayakan optimalisasi kegiatan dengan cara pemanfaatan teknologi. Keterbatasan pertemuan karena harus menjaga jarak, menjadikan beberapa kegiatan/rapat-rapat yang harusnya dilaksanakan tatap muka, kini lebih banyak melalui pertemuan virtual Menggunakan video conference zoom, google working space, whatsapp Cisco Webex yang memudahkan konektivitas kerja yang saat ini sering dilakukan secara hybrid. di era pandemik ini menjadi alternative paling efektif dalam mencapai target yang telah di rencanakan.

5.2 REKOMENDASI

Direktorat PPISDA dalam mengemban tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air memiliki mitra kerja yang cukup banyak, diantaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pemerintah Daerah, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, PT. PII, Balai Wilayah Sungai. Sehingga diperlukan rapat-rapat dan koordinasi secara intensif. Meskipun apabila di tahun mendatang pandemic Covid-19 masih ada, rapat dan koordinasi dengan mitra kerja dan pihak terkait yang idealnya dilakukan secara tatap muka, masih bisa dilakukan secara efektif dan efisien menggunakan video conference zoom. Kegiatan yang masih membutuhkan aktivitas survey dan kunjungan lapangan masih bisa dilakukan namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti di tahun 2022 terkait proyek KPBU infrastruktur sumber daya air yaitu: Direktorat PPISDA melalui pemrakarsa proyek KPBU PLTM Bintang Bano akan melakukan riviui FS, Dokumen Pengadaan, dan Dokumen Perjanjian Kerjasama dikarenakan ada kebutuhan studi topografi, penyusunan desain penataan alur sungai penempatan penstock PLTM, dan *Power House*. Setelah itu akan dilanjutkan dengan lelang KPBU yang diperkirakan akan selesai pada kuartal I di 2023.

Selain itu, secara paralel Direktorat PPISDA akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, PT. PII dan PT PLN terkait dukungan regulasi penetapan tarif di awal sebelum lelang KPBU, dan kemungkinan menggunakan skema *solicited* untuk proyek PLTM selanjutnya.